



dispora
provinsi **Riau**



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI RIAU

TAHUN

2025-2029

0761 - 23369



disporariau



www.dispora.riau.go.id





SALINAN

GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 35 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

GUBERNUR RIAU,

TTD

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19840326 200903 1 003



KATA PENGANTAR

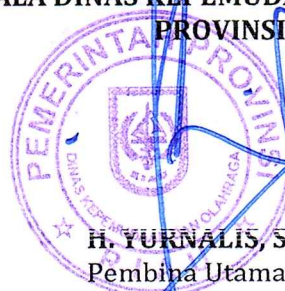
Syukur Alhamdulillah, segala puji hanya tercurah kehadirat Allah S.W.T. karena Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029 yang disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan lima tahunan. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Strategis ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) merupakan acuan perencanaan Perangkat Daerah selama lima tahun yang termuat dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan juga akan menjadi bahan evaluasi kinerja pencapaian tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga hingga tahun 2029 yang akan datang. Adapun penyusunan Perubahan RENSTRA PD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Perubahan RENSTRA ini sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan RENSTRA 2025-2029 ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin

Pekanbaru, 28 Oktober 2025

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI RIAU**



H. YURNALIS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710417 200212 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I – 3
1.3. Maksud dan Tujuan	I – 6
1.4. Sitematika Penulisan	I – 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II - 1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	II - 1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II - 7
2.2.1. Sumber Daya Manusia	II - 7
2.2.2. Aset/ modal	II - 9
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-12
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan	II-12
2.3.2. Realisasi Anggaran pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	II-23
2.4. Kelompok Sasaran layanan	II-25
2.5. Mitra Perangkat Daerah	II-26
2.6. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-26
2.7. Isu Strategis	II-27
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III – 1
3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	III – 2
3.2. Strategi Renstra Perangkat Daerah	III – 3
3.3. Pentahapan	III – 3
3.4. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029	III – 4
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV – 1
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	IV – 1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV- 30
BAB V PENUTUP	V – 1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL

2.1.	Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan Ruang Gaji	II - 7
2.2.	Jumlah PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan tingkat pendidikan	II - 8
2.3.	Jumlah PNS pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan jabatan	II - 8
2.4.	Keadaan tenaga Pendukung/Non-PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau	II - 9
2.5.	Jumlah inventaris pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	II- 10
2.6.	Jumlah Venue Olahraga dan Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	II -11
2.7.	Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Riau Tahun 2020-2023	II -12
2.8.	Organisasi Pemuda Binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2020-2024	II -13
2.9.	Perkembangan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Provinsi Riau Tahun 2021-2023	II – 15
2.10.	Perolehan Medali Pada Single Event Nasional Tahun 2023-2024	II – 18
2.11.	Perolehan Medali Pada Multi Event Nasional Tahun 2021-2024	II –19
2.12.	Perolehan Medali Atlet NPC dan SOIna Pada Event Multi Event Nasional Tahun 2021 - 2023	II –20
2.13.	Jumlah Atlet Yang Mengikuti Event Wilayah dan Nasional Tahun 2022-2024	II –20
2.14.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau	II –22
2.15.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau	II –24
2.16.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau	II –26
2.17.	Rumusan Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau	II –28
3.1.	Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD Pemerintah Provinsi Riau	III –2

RENSTRA DISPORA PROV. RIAU TAHUN 2025 – 2029

3.2.	Rumusan Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Tahun 2025-2029	III -3
3.3.	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	III -4
3.4.	Perumusan Arah dan Kebijakan Renstra PD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau	III -4
4.1.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	IV -2
4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	IV -11
4.3.	Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV -29
4.4.	Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2025-2030	IV -30
4.5.	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2025-2030	IV -31

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

- | | | |
|-----|---|--------|
| 2.1 | Bagan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 | II – 3 |
|-----|---|--------|



Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki sangat berperan penting dalam mencapai tujuan pembangunan. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pengertian perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.

Rencana pembangunan yang harus disusun meliputi rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah (PD). Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Pada dasarnya Rencana Strategis Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai

dengan dengan tugas fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif

Fungsi Rencana Startegis perangkat daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD serta sebagai instrument Evaluasi penyelenggaraan Bidang Urusan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 perlu memperhatikan keselarasan perencanaan pembangunan Wilayah, Nasional, dan Sektoral dengan tetap menyesuaikan terhadap kondisi dan karakteristik daerah sesuai prinsip otonomi daerah. Disamping itu berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah maka pemerintah daerah perlu memperhatikan integrasi perspektif gender dalam penyusunan renstra.

Selanjutnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau menyusun Renstra Tahun 2025-2029. Renstra Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Riau nantinya dijadikan acuan untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. Renstra Dispora Provinsi Riau ini kemudian dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.

Perencanaan pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan Provinsi Riau secara terpadu dan berkelanjutan, tidak terlepas dari arah Undang-Undang Keolahragaan dan UU Kepemudaan. Skenario dan perencanaan pemberdayaan pemuda diarahkan pada fokus dan *locus* pembangunan pemuda baik secara intelektualitas, jasmani, rohani, kepribadian dan budi pekerti yang kreatif dan dinamis serta memiliki jiwa kebangsaan yang mengarah pada terbangunnya *Nation and Character Building*.

Namun, ada beberapa prasyarat ke depan yang harus dipenuhi adalah sejauh mana kebijakan daerah mengayomi visi tersebut, sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepemudaan, kreativitas, *life skills*, pembinaan dan pendampingan serta

wawasan kebangsaan dan sustainability program kepemudaan, di sisi lain, pembangunan di bidang keolahragaan adalah 3 (tiga) pilar yang harus dilakukan ke depan, yaitu (1) pembinaan olahraga pendidikan; (2) pembinaan olahraga prestasi; dan (3) pembinaan olahraga rekreasi. Ketiganya menjadi satu kesatuan terintegrasi dalam rangka peningkatan manusia Indonesia seutuhnya. Pembinaan olahraga yang menjadi sasaran adalah usia dini, usia sekolah (SD, SMP, SMA sederajat) dan usia pembinaan olahraga. Sementara itu, olahraga prestasi di arahkan pada pengembangan prestasi dengan prasyarat kepelatihan dan sarana yang memadai dan *reward* yang menunjang prestasi. Sementara itu, olahraga masyarakat dan rekreasi diarahkan bagi pengembangan keolahragaan masyarakat dan olahraga tradisional yang mengikut sertakan partisipasi masyarakat untuk secara sadar dan terdorong hidup sehat melalui peduli olahraga yang diharapkan akan berimbas kepada etos perilaku yang positif dan prospektif. Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembinaan olahraga telah cukup berkembang, bahkan mempunyai andil dalam pencapaian prestasi di tingkat Nasional maupun Internasional pada beberapa cabang olahraga, oleh sebab itu, penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini dilakukan sesuai dengan sumber daya yang tersedia melalui pendekatan kewilayahan berdasarkan karakteristik wilayah dan permasalahan dengan strategi perencanaan pembangunan yang terpadu.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025–2029 ini memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029.
 26. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan untuk menyediakan panduan jangka menengah yang mengarahkan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan perangkat daerah agar selaras dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung efektif, akuntabel, dan berkelanjutan dalam periode lima tahun.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2025–2029 ini adalah untuk;

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2025-2029;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga periode tahun 2025-2029;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Tahun 2025-2029;
4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2025-2029 perangkat Daerah.
5. Merumuskan perencanaan pembangunan bidang Pendidikan yang responsif gender dan inklusif.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025–2029 terdiri atas :

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan yang memuat gambaran umum penyusunan Dokumen Renstra yang memuat sub-sub tentang Latar Belakang Penyusunan Renstra, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat tentang gambaran kondisi objektif Perangkat Daerah dan hasil capaian yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir serta menyajikan data dan informasi seperti Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumberdaya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan Kelompok Sasaran Layanan, Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu Strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 - 2029 berdasarkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan outcome dan output serta merumuskan strategis dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, serta uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. Selain itu juga menyajikan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2026-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan terget kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah



2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyeleggarakan fungsi:

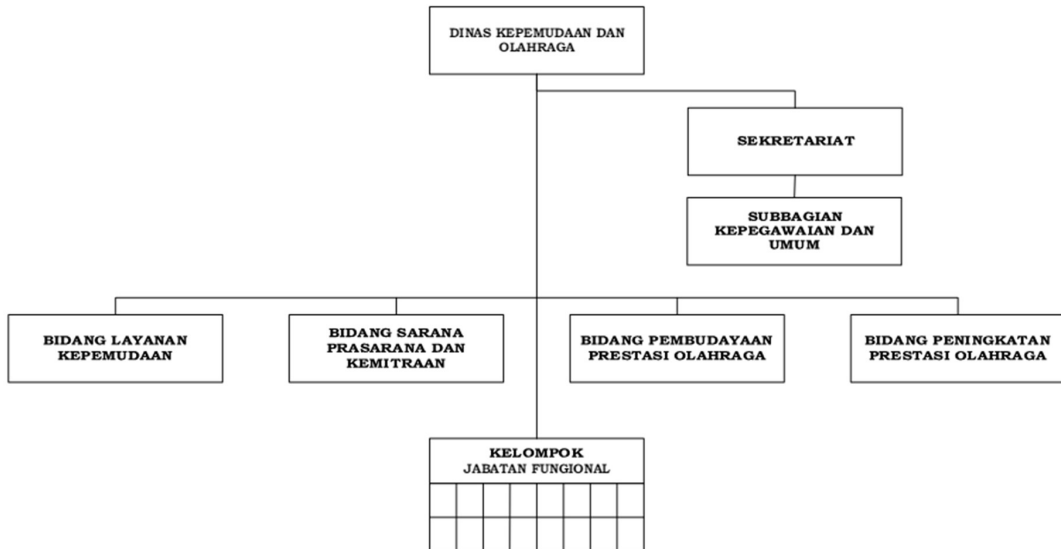
- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;

- b. Pelaksanaan kebijakan pada Kesekretariatan, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Kesekretariatan, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga ;
- b. Kesekretariatan, Terdiri dari Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Layanan Kepemudaan
- d. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan
- e. Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga
- f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau



Gambar 2.1 adalah Bagan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024

A. Tugas dan Fungsi Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;

- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional

B. Tugas dan Fungsi Bidang Layanan Kepemudaan

- 1) Kepala Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda serta Kemitraan dan Penghargaan Pemuda.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Layanan Kepemudaan;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Layanan Kepemudaan;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan layanan kepemudaan dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Layanan Kepemudaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Tugas dan Fungsi Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan

- 1) Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Sarana dan Prasarana olahraga, Sarana dan Prasarana Pemuda serta Pengembangan dan Kemitraan Sarana Prasarana.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Tugas dan Fungsi Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga

- 1) Kepala Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga, Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus serta Pengembangan Organisasi, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga;

- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

- 1) Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pelajar dan Tenaga Keolahragaan, Promosi dan Pembinaan Olahraga Mahasiswa serta Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga didukung sumber daya sebagai berikut:

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga didukung personil atau sumber daya manusia. Adapaun keadaan Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang gaji disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang Gaji

NO	PANGKAT /GOL	JUMLAH (ORANG)	JUMLAH LAKI-LAKI (ORANG)	JUMLAH PEREMPUAN (ORANG)
1	2	3	4	5
1	Pembina Utama Madya (IV/c)	1	1	-
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	5	4	1
3	Pembina (IV/a)	7	4	3
4	Penata Tingkat I (III/d)	17	10	7
5	Penata (III/c)	13	8	5
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	20	15	5
7	Penata Muda (III/a)	6	4	2
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	14	11	3
9	Pengatur (II/c)	1	1	-
10	Pengatur Muda Tingkat (II/b)	1	1	-
11	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
12	Juru Tingkat I (I/d)	-	-	-
13	Juru (I/c)	-	-	-
14	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	-
	Jumlah	85	59	26

(Sumber: Data TW II Tahun 2025)

Selanjutnya keadaan PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan tingkat pendidikan

NO	PANGKAT /GOL	JUMLAH (ORANG)	JUMLAH LAKI-LAKI (ORANG)	JUMLAH PEREMPUAN (ORANG)
1	2	3	4	5
1	Strata 3	-	-	-
2	Strata 2	22	16	6
3	Strata 1	44	29	15
4	Diploma 3	3	3	-
5	Diploma 1	-	-	-
6	SMA/SLTA	16	11	5
7	SMP	-	-	-
8	SD	-	-	-
	Jumlah	85	59	26

(Sumber: Data TW II Tahun 2025)

Untuk keadaan PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Jabatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah PNS pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Jabatan

No.	JABATAN	JUMLAH LAKI-LAKI (ORANG)	JUMLAH LAKI-LAKI (ORANG)	JUMLAH PEREMPUAN (ORANG)
1.	Pejabat Tinggi Pratama	1	1	0
2.	Pejabat Administrator	5	5	0
3.	Pejabat Pengawas	1	1	0
4.	Pelaksana	62	39	23
5.	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	16	13	3
	JUMLAH	85	59	26

(Sumber: Data Urutan TW II Tahun 2025)

Selain itu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau juga didukung oleh tenaga Pendukung/Non-PNS untuk menunjang kelancaran, kenyamanan, dan keamanan pelaksanaan pelayanan, yang terdiri dari:

Tabel 2.4

Keadaan tenaga Pendukung/Non-PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

No.	Tenaga Pendukung/Non-PNS	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Web Designer	1	1	-
2	Electronic Data Processing	1	-	1
3	Tenaga Akuntansi	2	1	1
4	Operator Komputer	91	37	54

(Sumber: Data Juni 2025)

Untuk tenaga Non PNS ini berada di tiap-tiap bidang dan sekretariat untuk membantu dan menjalankan tugas dan fungsi pelaksanaan pelayanan.

2.2.2. Asset/modal

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga didukung Asset/modal berupa tanah, bangunan, peralatan dan mesin, sebagai berikut:

a. Sarana Prasarana Aparatur

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, memiliki 1 (satu) gedung dua lantai. Setiap lantai dan ruangan kerja dilengkapi dengan fasilitas Air Condition (AC). Di setiap ruangan juga dilengkapi prasarana kerja berupa meja kerja, kursi kerja, komputer, printer, mesin photo copy, scanner serta jaringan LAN/WLAN. Khusus untuk Pejabat Tinggi Pratama disediakan 1 (satu) unit mobil jabatan, sedangkan pejabat Administrator disediakan kendaraan operasional minibus.

Tabel 2.5
Jumlah inventaris pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No	Jenis	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6224	M2	Baik
2	Meja Kayu Bersekat	8	Buah	Baik
3	AC Split	80	Unit	55 Unit Baik 12 Unit Pengajuan Penilaian 2 Rusak Berat
4	PC Unit	80	Unit	85 Unit Baik 17 Unit Pengajuan Penilaian
5	Note Book	-	Unit	9 Unit Baik digunakan di Kantor 6 Unit PON XVIII Atletik 2 Unit PoN XVIII Dayung 5 Unit Pon XVIII Taolu 2 Unit Pengajuan Penilaian 7 Unit Rusak Berat
6	Laptop	10	Unit	Baik
7	Printer	80	Unit	42 Unit Baik 21 Unit Rusak Ringan 28 Unit Pengajuan Penilaian
8	Hub (Switch Hub) 8 Port	8	Unit	Baik
9	Mobil Dinas	9	Unit	Baik
10	MesinKetik Manual Portable	-	Unit	Baik
11	MesinFotocopy	10	Unit	7 Unit Baik 2 unit Rusak Ringan 2 Unit Rusak berat
12	Lemari Besi	21	Unit	Baik
13	Rak Besi / Metal	31	Unit	Baik
14	Lemari Kayu	5	Unit	Baik
15	Filling Besi / Metal	56	Unit	Baik
16	Brand Kas	6	Unit	Baik
17	Lemari Kaca	4	Unit	Baik
18	Lemari Buku	10	Unit	Baik
19	CCTV	22	Titik	Baik
20	Alat PenghancurKertas	5	Unit	Rusak Berat
20	MesinAbsensi	7	Unit	Baik
21	Meja Resepsionis	2	Unit	Kurang Baik

No	Jenis	Volume	Satuan	Keterangan
22	Meja Kerja	92	Unit	Baik
23	Meja Rapat Panjang LipatBesi	10	Unit	Baik
24	Meja Rapat	4	Unit	Baik
25	KursiRapat	50	Unit	Baik
26	KursiKerja	199	Unit	Baik
27	Sofa	12	Unit	Baik
28	Sound System	4	Unit	Baik
29	Microphone Floor Stand	4	Unit	Baik
30	Mic Conference	5	Unit	Baik
31	TV	13	Unit	Baik

(Sumber: Kartu Inventaris Barang tahun 2024)

b. Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

Untuk mendukung aktifitas kepemudaan dan olahraga Dinas kepemudaan dan Olahraga mengelola beberapa sarana prasarana kepemudaan dan olahraga ditampilkan pada Tabel 2.6

Tabel 2.6
Jumlah Venue Olahraga dan Kepemudaan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No	Jenis	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Stadion Utama Riau	75.543	M2	Baik
2	Kawasan Sport Centre Rumbai	313.400	M2	Baik
3	Gelanggang Remaja	34.978,4	M2	Baik
4	Kolam Renang Sport Centre Rumbai	29.120	M2	Baik
5	Hall Basket Sport Centre Rumbai	7.500	M2	Baik
6	Hall Senam Sport Centre Rumbai	5.500	M2	Baik
7	Stadion Kaharuddin Nasution Sport Centre Rumbai	10.543	M2	Baik
8	Stadion Atletik Sport Centre Rumbai	7.000	M2	Baik
9	Hall Bela Diri Sport Centre Rumbai	5.600	M2	Baik
10	Hall Sepak Takraw	3.750	M2	Baik

No	Jenis	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
11	Asrama Atlit Sport Centre Rumbai	9.690,76	M2	Baik
12	Stadion Base Ball	23.549	M2	Baik
13	Hall Menembak	5.561	M2	Baik
14	GOR Tribuana	12.903	M2	Baik
15	Komplek Kepemudaan	4.302,7	M2	Baik

(Sumber: Bidang Sarana dan Prasarana tahun 2025)

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

a. Sub Bidang Kepemudaan

Jumlah penduduk Provinsi Riau pada akhir tahun 2023 adalah 6.861.237 jiwa. Sementara total jumlah pemuda di Bumi Lancang Kuning adalah sebesar 24,03 persen atau sebesar 1.646.696 jiwa. Perkembangan IPP Provinsi Riau tahun 2023 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan capaian IPP pada tahun 2022. Pada tahun 2023 IPP Provinsi Riau senilai 60,43 dan pada tahun 2022 hanya menyentuh angka 55,27, angka IPP Provinsi Riau naik 5 poin dibandingkan tahun 2022 namun angka ini lebih rendah dibandingkan IPP Nasional yaitu 60,59.

Tabel 2.7
Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Provinsi Riau Tahun 2020-2023

No.	IPP / Domain	2020	2021	2022	2023
1	NASIONAL	58.45	57.91	58.76	60.59
2	RIAU	49.64	56.46	55.27	60.43
2.1.	Pendidikan	65.25	63.44	65.28	67.87
2.2.	Kesehatan dan Kesejahteraan	43.33	72.72	49.06	59.84
2.3.	Lapangan dan Kesempatan Kerja	60.77	62.70	62.39	69.34
2.4.	Partisipasi dan Kepemimpinan	9.57	17.46	41.47	41.62
2.5.	Gender dan Diskriminasi	69.49	66.08	57.76	63.23

Sumber Data : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pada tabel Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Riau di atas pada tahun 2020-2023 dapat dilihat bahwa ke 5 domain pembentuk IPP yaitu domain Pendidikan dan Pelatihan mengalami kenaikan setiap tahunnya, domain kesehatan mengalami fluktuatif, domain ketenagakerjaan layak mengalami kenaikan tiap tahunnya sedangkan domain partisipasi dan kepemimpinan mengalami kenaikan yang sedikit, sedangkan domain Inklusivitas dan gender mengalami fluktuatif.

Untuk tahun 2023, Domain Pembentuk IPP tiga terendah berada di Domain Partisipasi dan Kepemimpinan, domain Kesehatan dan domain inklusivitas dan kesetaraan gender. Pada domain Partisipasi dan Kepemimpinan yang rendah pada indikator pemuda aktif mengikuti organisasi dan Pemuda yang menduduki posisi manajerial. Pada domain Kesehatan yang rendah pada indikator pemuda yang berolahraga dan remaja yang hamil. Pada domain inklusivitas dan kesetaraan gender yang rendah pada indikator pemuda disabilitas yang bekerja.

Organisasi Pemuda merupakan wadah bagi pemuda untuk melatih kepemimpinan. Keberadaan organisasi Pemuda bernilai strategis dalam pembangunan bangsa karena diharapkan akan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan. Oleh sebab itu pembinaan terhadap organisasi pemuda harus senantiasa dilakukan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas.

Tabel 2.8
Organisasi Pemuda Binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
Tahun 2020-2024

No	Organisasi Pemuda Binaan Dispora	Jumlah Pengurus				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Provinsi Riau	700	746	746	56	488
2	Purna Caraka Muda Indonesia (PCMI) Provinsi Riau	20	20	20	77	16
3	Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) Provinsi Riau	15	15	15	27	21

No	Organisasi Pemuda Binaan Dispora	Jumlah Pengurus				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	Korsp Alumni Kapal Pemuda Nusantara (KA KPN) Provinsi Riau	25	25	25	25	-
5	Forum kewirausahaan Pemuda (FKP) Provinsi Riau	20	10	10	10	10
6	Forum Pemuda Pelopor Provinsi Riau	50	100	100	100	10
7	Relawan Muda Riau (RMR)	50	320	320	7	30
8	Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (PEPELINGASIH)	24	145	145	145	-
9	Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Riau	26	500	320	32	32
10	Forum OSIS Riau	-	-	-	-	50
11	Pramuka	-	-	-	-	3809

(Sumber Data: Dispora Provinsi Riau)

Beberapa tantangan yang dihadapi pada bidang layanan kepemudaan diantaranya belum serasinya berbagai kebijakan di bidang kepemudaan baik di tingkat Provinsi maupun Nasional, tingginya tingkat urbanisasi sebagai akibatdaya tarik kehidupan kota yang lebih kuat ketimbang di daerah pedesaan, persaingan tidak sehat dalam menjalankan bisnis dan masih kuatnya budaya jalan pintas dan fanatisme yang sempit.

Namun tantangan ini dapat menjadi peluang untuk lahirnya kebijakan pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugasdilingkungan pemuda, perkembangan media masa dan teknologi informasi yang dapat mendukung

pelaksanaan tugasDinas Kepemudaan dan Olahraga, pemuda sebagai pewaris generasi dan terbukanya lapangan usaha berbasis digital.

b. Sub Bidang Olahraga

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) menyajikan data dan informasi keolahragaan nasional, terutama menyangkut 9 dimensi. Data dan informasi tersebut dihasilkan dari proses pengumpulan data di 34 provinsi di Indonesia, yang kemudian dianalisis secara mendalam dan dikaitkan dengan bukti-bukti empirik lain yang relevan sehingga diperoleh pengetahuan yang akuntabel dan kredibel. Adapun perkembangan pengukuran IPO Provinsi Riau disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.9
Perkembangan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Provinsi Riau
Tahun 2021-2023

No.	IPO / Dimensi	2021	2022	2023
1	NASIONAL	0.408,	0.376	0.327
2	RIAU	0.431	0.355	0.387
2.1.	Sumber Daya Manusia	0,030	0.042	0.070
2.2.	Ruang Terbuka Olahraga	0,398	0.321	0.624
2.3.	Literasi Fisik	0,581	0.595	0.595
2.4.	Tingkat Partisipasi Olahraga	0.435	0.356	0.244
2.5.	Tingkat Kebugaran	0.214	0.159	0.172
2.6.	Kesehatan dan Kesejahteraan Psikis	0.411	0.411	0.420
2.7.	Risilien dan Modal Sosial	0.538	0.543	0.522
2.8.	Capaian Olahraga Prestasi	0.651	0.220	0.222
2.9.	Ekonomi Olahraga	0.610	0,551	0.611

Sumber : Kemenpora RI; Laporan Indeks Pembangunan Olahraga Tahun 2023

IPO Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2023 sebesar 0,387 diatas dari skala 0-1. Capaian tersebut meningkat 0,032 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang sebesar 0,355. Dimensi yang masuk dalam kategori rendah secara berurutan adalah adalah SDM, Tingkat Kebugaran, Capaian Olahraga Prestasi, dan tingkat partisipasi olahraga. Sedangkan dimensi yang masuk dalam kategori menengah secara berurutan adalah Ruang Terbuka Olahraga, Ekonomi Olahraga, Literasi Fisik, dan Risilien dan Modal Sosial.

Di bidang keolahragaan saat ini antara lain meningkatnya penggunaan sistem manajemen pengelolaan olahraga yang berbasis

digital, tuntutan publik terhadap prestasi olahraga, olahraga yang menjadi instrumen pembangunan daerah maupun nasional. Sebaran barang/produk peralatandan perlengkapan olahragadari Negara-Negara ASEAN dankawasan Asia Pasifik lainnya, yang harganya relatif lebih murah, lebih kuat,lebih menarik, lebih bermutu dan awet,permintaan sarana dan prasarana olahragayang harus memenuhi standar, penggunaan media elektronik secara masif, kebutuhan dan tuntutan kesejahteraan atlet berprestasi.

Disamping itu, Pemerintah Pusat juga membuat terobosan untuk meningkatkan prestasi olahraga di level nasional Indonesia dan level internasional, dengan menyusun Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Tantangan yang dihadapi adalah untuk menyusun Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) memerlukan kesinambungan antarlini dan sektor terkait, membutuhkan adanya kajian total dari rancangan ulang ekosistem olahraga, serta sinergisitas pembinaan atlet dari daerah hingga nasional. Program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) merupakan pembinaan terhadap 14 cabang olahraga unggulan yang mengutamakan teknik dan akurasi, juga lebih difokuskan untuk mengincar sasaran Olimpiade. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Tentunya dapat mendatangkan peluang yang cukup besar untuk pembinaan atlet bagi daerah untuk menyusun program Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD). Yang diperlukan adalah usaha yang makin keras, sikap kerja semakin profesional, dan yang terpenting adalah optimisme. Karena tantangan sebenarnya bertujuan meningkatkan daya saing serta bisa menyaingi daerah-daerah yang sudah memiliki segudang prestasi di dunia olahraga. Masing-masing Daerah Kabupaten/Kota diharapkan untuk segera menyusun Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD) menyesuaikan dengan cabang olahraga unggulan masing-masing Daerah.

Usaha kerja keras akan menghasilkan peluang bagi daerah antara lain adanya kesadaran masyarakat berolahraga serta upaya peningkatan kualitas hidup, memajukan industri hiburantontonan, rekreasi dan pariwisata yang berbasis olahraga, lembaga semakin memiliki eksistensi

ditengah-tengah masyarakat, pemanfaat sistem manajemen olahraga berbasis digital, meningkatkan pelayanan keolahragaan lebih menyangkut dengan meningkatkan budaya olahraga masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, menyediakan Prasarana dan Sarana olahraga yang memenuhi standar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Menyediakan sarana dan prasarana olahraga di desa-desa, pemanfaatan ruang terbuka olahraga di Provinsi Riau. Upaya pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga ini diharapkan dapat meningkatkan nilai SDI Riau.

Untuk meningkatkan Sumber daya manusia dibidang olahraga terutama di bidang teknologi olahraga, dapat mensinergikan antara pemerintah dengan Akademisi olahraga, pariwisata, dan pihak swasta untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian, dapat mengintegrasikan kompetisi olahraga dalam bingkai industri yang bernilai ekonomi, baik event olahraga itu sendiri maupun dampaknya dalam berbagai sektor kehidupan lainnya, seperti pariwisata dan perluasan informasi kegiatan olahraga berupa tayangan dan hiburan.

1. Jumlah Atlet Berprestasi di Tingkat Wilayah Nasional

Berikut ini prestasi-prestasi olahraga dalam kurun waktu 2020-2024 yang telah diraih atlet-atlet Provinsi Riau pada ajang multi event dan single event tingkat wilayah maupun tingkat nasional. Prestasi merupakan hasil pembinaan olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) serta hasil pembinaan dari Organisasi Keolahragaan yakni KONI Riau, NPC Riau dan SOIna Riau yang memperoleh dana hibah dari Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau. Berikut hasil perolehan medali atlet PPLP Riau yang mengikuti ajang single event Nasional.

Tabel 2.10
Perolehan Medali Pada Single Event Nasional
Tahun 2023-2024

No	Tahun	Nama Kejuaraan	Perolehan Medali (jumlah atlet orang)					
			Emas		Perak		Perunggu	
			Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi
1	Tahun 2023	Kejuaraan Antar PPLP Cabor Sepak Bola	-	-	18	-	-	-
2	Tahun 2023	Kejuaraan Antar PPLP Cabor Dayung	5	-	2	-	5	-
3	Tahun 2023	Kejuaraan Antar PPLP Cabor Panahan	-	-	-	2	-	-
4	Tahun 2023	Kejuaraan Antar PPLP Cabor Angkat Besi	-	-	-	-	2	-
5	Tahun 2024	Kejuaraan Antar PPLP Cabor Panahan	-	-	-	-	-	-
6	Tahun 2024	Kejuaraan Antar PPLP Cabor Angkat Besi	3	-	1	-	1	-
7	Tahun 2024	Kejuaraan Antar PPLP Cabor Dayung	2	-	2	-	-	-
8	Tahun 2024	Kejuaraan Antar PPLP Cabor Atletik	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Dispora Provinsi Riau, 2024

Ajang Kejurnas antar PPLP/D dan SKO merupakan event yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengetahui capaian pembinaan atlet PPLP/D/SKO di Daerah. Pada tahun 2020, 2021 dan 2022 event Kejurnas antar PPLP/D dan SKO tidak dilaksanakan karena adanya pandemic Covid-19 dan kembali dilaksanakan pada tahun 2023.

Tabel 2.11
Perolehan Medali Pada Multi Event Nasional
Tahun 2021-2024

NO	KEGIATAN	TAHUN	LOKASI	JUMLAH PRESTASI ATLET (Orang)					
				EMAS		PERAK		PERUNGGU	
				Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi
1.	Pekan Olahraga Nasional (PON)	2021	Papua	19	11	16	13	25	8
2.	Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (PraPOPNAS)	2022	Jakarta	8	3	6	4	4	5
3.	Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	2022	Solo	-	-	1	-	3	1
4.	Pekan Olahraga Wartawan Nasional (PORWANAS)	2022	Malang	-	-	-	-	46	-
5.	Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)	2023	Palembang	4	5	11	4	23	4
6.	Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNas)	2023	Kalimantan Selatan, Banjarmasin	-	6	3	-	3	2
7.	Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Pra POPNAS) Zona 1	2024	Sumatera Barat	6	12	7	2	8	2

(Sumber Data: Dispora Provinsi Riau)

Disini dapat dijelaskan bahwa event Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020, Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 2021 dan Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS) 2021 batal dilaksanakan karena pandemic covid-19. Namun pelaksanaan event Nasional Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) tetap diselenggarakan pada tahun 2021 mengingat sudah diadakan penundaan dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2022 event yang diikuti adalah Pra POPNAS, POSPENAS dan PORWANAS melalui Dispora Provinsi Riau dan event PESONAS yang diikuti oleh SOIna Riau pada tahun 2022. Pada tahun 2023 sesuai dengan agenda event di Tingkat Nasional mengirimkan atlet pada event POPNAS, PEPARPENAS dan

POMNas. Tahun 2024 event nasional yang diikuti oleh Provinsi Riau adalah Pra POPNAS Zona 1 di Sumatera Barat.

Selanjutnya perolehan medali atlet berkebutuhan khusus (NPC dan SOIna) disajikan pada tabel 2.12 sebagai berikut:

Tabel 2.12
Perolehan Medali Atlet NPC dan SOIna Pada Event Multi Event Nasional Tahun 2021 - 2023

No	Nama Kejuaraan	Tahun	Lokasi	Perolehan Medali (jumlah atlet orang)					
				Emas		Perak		Perunggu	
				Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi
1	Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS)	2021	Papua	15	11	22	11	30	16
2	Pekan Special Olympic Nasional (PESONAS)	2022	Semarang	33	17	20	10	9	17
3	Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS)	2023	Palembang	-	1	2	2	1	-

(Sumber Data: Dispora Provinsi Riau)

2. Jumlah Atlet yang Mengikuti Event Wilayah dan Nasional

Dibawah ini jumlah atlet yang mengikuti Event Wilayah dan Nasional dari 2020-2023. Sedangkan, pada tahun 2020 dan 2021 batal dilaksanakan karena pandemi covid-19 dan kembali event dilaksanakan pada tahun 2022.

Tabel 2.13
Jumlah Atlet Yang Mengikuti Event Wilayah dan Nasional Tahun 2022-2024

NO	TAHUN	KEJURNAS		POPNAS		PEPARPENAS		POMNAS		PRA POPNAS		POSPENAS		PORWANAS		JUMLAH
		Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi			
1	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	39	18	27	27	48	2	161
2	2023	32	3	108	75	3	4	28	17	-	-	-	-	-	-	270
3	2024	24	5	-	-	-	-	-	-	86	48	-	-	-	-	134

(Sumber Data: Dispora Provinsi Riau)

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa jumlah atlet yang dikirim untuk mengikuti event Tingkat Nasional menyesuaikan sesuai

dengan event yang diselenggarakan pada tahun berkenaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2019-2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau berdasarkan T-C. 23 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Tabel 2.14. disajikan berikut :

Tabel 2.14
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Riau

NO.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK (3)	Target IKK (4)	Target Indikator Lainnya (5)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Pada Tahun			
					2021 (6)	2022 (7)	2023 (8)	2024 (9)	2021 (10)	2022 (11)	2023 (12)	2024 (13)	2021 (14)	2022 (15)	2023 (16)	2024 (17)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	<p>Tujuan : Persentase pemuda yang dibina menjadi pemuda pelopor (Persen)</p> <p>Sasaran : Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan Persentase partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri (Persen)</p>	-	-	-	15.31	41.36	39.07	40.46	25.09	26.69	141.63	38.49	163.90	64.53	362.49	95.13
					15.3	41.36	39.07	40.46	25.09	26.69	141.63	38.49	164.01	64.53	362.49	95.13
					7.90	5.30	5.00	5.20	10.69	15.2	50.08	32.59	135.26	286.79	1.001.59	626.73
2.	<p>Tujuan : Jumlah Atlet yang Berprestasi Ditingkat Wilayah dan Nasional (Orang)</p> <p>Sasaran : Jumlah Atlet yang Mengikuti Event Wilayah dan Nasional (Orang)</p> <p>Program : Jumlah Pemuda Yang Dibina (Orang) Jumlah Pemuda Yang Dibina menjadi kader Pramuka (Orang) Jumlah Atlet potensial yang Dibina (Orang)</p>	-	-	-	85	91	140	86	156	128	337	701	183.53	140.66	240.71	815.12
					200	215	352	214	315	328	885	701	157.50	152.56	251.42	327.57
					213	728	685	711	472	502	2.664	724	221.60	68.96	388.91	101.83
					75	50	50	50	50	50	300	50	66.67	100.00	600.00	100.00
					219	293	364	214	187	341	204	701	85.39	116.38	56.04	327.57

2.3.2. Realisasi Anggaran pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2021-2024 yang disajikan berdasarkan T-C.24 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Tabel 2.15 sebagai berikut :

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pokok Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau

Uraian (1)	Anggaran Pada Tahun ke		Realisasi Anggaran Pada Tahun ke		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun ke -		Realisasi (9)	
	2021 (2)	2022 (3)	2023 (4)	2024 (5)	2021 (6)	2022 (7)		2023 (8)
PENDAPATAN								
PENDAPATAN ASLI DAERAH								
Pendapatan Pajak Daerah	743.750.000,00	450.000.000,00	459.000.000,00	1.000.000.000,00	591.612.500,00	676.960.000,00	131,47	166,60
Pendapatan Retribusi Daerah								
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan								
Lain-lain PAD yang sah								
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	743.750.000,00	450.000.000,00	459.000.000,00	1.000.000.000,00	591.612.500,00	676.960.000,00	131,47	166,60
Jumlah Pendapatan	743.750.000,00	450.000.000,00	459.000.000,00	1.000.000.000,00	591.612.500,00	676.960.000,00	131,47	166,60
BELANJA								
BELANJA OPERASI								
Belanja Pegawai	14.176.068.934,00	14.612.859.413,00	15.058.118.963,00	16.922.932.356,00	13.991.825.277,00	14.776.374.626,00	95,75	93,68
Belanja Barang dan Jasa	70.397.392.028,00	42.464.993.099,00	44.811.658.332,00	61.061.775.418,00	39.483.831.396,07	41.395.653.108,00	92,98	90,60
Belanja Subsidi								
Belanja Hibah	66.513.000.000,00	40.600.000.000,00	68.223.293.000,00	62.300.000.000,00	39.851.124.083,00	66.640.902.676,00	98,16	97,70
Belanja bantuan Sosial								
Jumlah Belanja Operasi	151.086.460.962,00	97.677.850.512,00	128.093.070.295,00	140.284.707.774,00	93.326.780.756,07	122.812.890.410,00	95,55	94,12
BELANJA MODAL								
Belanja Modal Tanah								
Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	274.871.416,00	1488383057	823.754.632,00	570.244.343,00	262.115.397,00	778.894.050,00	89,31	46,42
Belanja Modal Gedung dan bangunan								
Belanja Modal Jih, Irigasi dan Jaringan								
Belanja Modal Asat tetap lainnya								
Belanja Modal Asat lainnya								
Jumlah Belanja Modal	274.871.416,00	1.488.383.057,00	1.327.509.264,00	754.954.343,00	262.115.397,00	1.324.981.300,00	89,31	54,26
Jumlah Belanja	151.361.332.378,00	99.166.233.569,00	129.420.579.559,00	141.039.662.117,00	94.651.936.153,07	124.137.871.710,00	95,45	93,93
Surplus/Defisit	-150.617.582.378,00	98.716.233.569,00	129.099.458.927,00	140.888.993.117,00	94.064.425.086,07	123.460.751.710,00	95,29	93,39

Dari tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau diatas dapat dijelaskan yaitu:

- a. Terkait belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Realisasi belanja pegawai tahun 2021 sebesar 98,10 persen, tahun 2022 sebesar 95,75 persen, tahun 2023 sebesar 98,13 persen, tahun 2024 sebesar 93,68 persen. Belanja barang dan jasa pada tahun 2021 sebesar 87,16 persen, tahun 2022 sebesar 92,98 persen, tahun 2023 sebesar 92,38 persen, tahun 2024 sebesar 90,60 persen. Untuk dana hibah dianggarkan pada tahun 2021-2024, Realisasi belanja hibah tahun 2021 sebesar 89,06 persen, tahun 2022 sebesar 98,16 persen, tahun 2023 sebesar 97,68 persen, tahun 2024 sebesar 97,70 persen.
- b. Terkait belanja modal yang meliputi belanja modal. Realisasi belanja modal pada tahun 2021 sebesar 95.36 persen, pada tahun 2022 sebesar 89,31 persen, pada tahun 2023 realisasinya sebesar 96,32 persen, 2024 realisasinya sebesar 54,26 persen.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Adapun kelompok sasaran layanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau periode 2025 - 2029 adalah :

- a. Penduduk usia 16 s/d 30 tahun
- b. Organisasi Pemuda tingkat provinsi
- c. Atlit tingkat provinsi
- d. Pelatih tingkat provinsi
- e. SDM Keolahragaan Tingkat Provinsi
- f. Kwarda Pramuka

2.5. Mitra Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau juga bermitra dengan beberapa organisasi keolahragaan dan kepemudaan antara lain :

- a. KONI Riau
- b. NPC Riau
- c. SOIna Riau
- d. Kwarda Gerakan O4 Pramuka Riau

2.6. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau serta berdasarkan pada beberapa aspek kajian, kondisi saat ini, standar pencapaian yang digunakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dan isu strategis yang dikelompokkan dalam aspek kebudayaan.

Selanjutnya identifikasi permasalahan berdasarkan hasil perumusan menggunakan tabel T-B.35 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.16
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya prestasi olahraga Provinsi Riau ditingkat wilayah dan nasional	1.1 Masih rendahnya daya saing olahraga Daerah	1.1.1 Masih kurangnya penyelenggaraan event olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan
			1.1.2 Masih kurangnya keikutsertaan atlit dalam event Olahraga
			1.1.3 Masih kurangnya pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Masih rendahnya peran pemuda dalam pembangunan	2.1 Masih rendahnya daya saing Pemuda Daerah	2.1.1. Meningkatkan pemuda yang siap menjadi pemimpin dan pelopor pembangunan
			2.1.2. Masih Kurangnya wirausaha muda yang mandiri
			2.1.3. Belum Optimalnya pembinaan dan pengembangan organisasi pemuda
			2.1.4. Belum optimalnya pembinaan organisasi pramuka

2.7. Isu Strategis

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari Lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD.

Merumuskan isu strategis daerah disimpulkan dari: Permasalahan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dan potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Isu strategis urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel 2.14 berikut:

Tabel 2.17

Rumusan Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Pengelolaan atlet berprestasi	Masih rendahn ya daya saing olahraga Daerah	Kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia belum merata	Bonus Demografi	Bonus Demografi	Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyelenggaraan event olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan 2. Peningkatan keikutsertaan atlet dalam event Olahraga 3. Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga
Pelayanan penduduk usia umur 16-30	Masih rendahn ya daya saing Pemuda Daerah					<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemuda yang siap menjadi pemimpin dan pelopor Pembangunan 2. Peningkatan wirausaha muda yang mandiri 3. Peningkatan pembinaan dan pengembangan organisasi Pemuda. 4. Peningkatan pembinaan Organisasi Pramuka.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan daerah yang harus selaras dan mendukung visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Visi pembangunan Provinsi Riau untuk kurun waktu 2025-2029 yaitu: “Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju”.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskanlah misi pembangunan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yaitu :

- Misi 1: Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan serta keberpihakan pada disabilitas dan kelompok marginal
- Misi 2 : Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan
- Misi 3 : Memperkuat infrastruktur yang handal, guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah
- Misi 4: Memerangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah serta menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan
- Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan berintegritas serta pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan profesional menuju pemerintahan yang berkelas dunia (*World Class Government*)

Misi 6: Memperkuat riset dan inovasi serta kerjasama pembangunan guna akselerasi capaian pembangunan melalui *multi helix partnership*, kerjasama antar daerah maupun kerjasama global

Misi 7: Mewujudkan kebudayaan melayu sebagai alat pemersatu dan perwujudan nilai nilai kearifan lokal serta mendorong kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, nyaman dan adil untuk semua.

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mengacu Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 penentuannya didasarkan pada :

- Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
- Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Rumusan tujuan jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau yang ingin dicapai sesuai format tabel 3.3 Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD
Pemerintah Provinsi Riau

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
NSPK: • Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Ekonomi Mandiri • Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial • Meningkatnya Prestasi Olahraga SASARAN RPJMD: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Sehat dan Produktif	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga		Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	55.17	55.17	55.17	55.17	55.65	57	58.17	
			Jumlah Atlit yang Berprestasi Ditingkat Wilayah dan Nasional (Orang)	298	63	93	264	298	78	102	
		Meningkatnya Atlit Yang Kompetitif Di Tingkat Wilayah dan Nasional	620	243	180	581	710	407	217		
		Meningkatnya Pemuda Yang Siap Berperan Aktif di Masyarakat	391	460	420	320	320	350	370		
		Jumlah organisasi pemuda yang aktif dalam pembangunan (Organisasi)	10	10	10	10	10	10	10		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	68,05	68,05	69,55	70,46	70,86	71,48	71,50		

3.2. Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, rumusan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2029 adalah dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	1. Meningkatnya atlit yang kompetitif ditingkat wilayah dan nasional	1.1. Peningkatan pembinaan dan pengembangan pengolahraga
		1.2. Peningkatan pembinaan dan pengembangan organisasi keolahraagaan
		1.3. Peningkatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga
		1.4. Peningkatan pemanfaatan sarana prasarana olahraga
	2. Meningkatnya pemuda yang siap berperan aktif dimasyarakat	2.1. Peningkatan penyadaran dan pemberdayaan pemuda
		2.2. Peningkatan kapasitas kepemimpinan kepeloporan dan kesukarelawan pemuda
		2.3. Peningkatan kapasitas kepemudaan provinsi
		2.4. Peningkatan kapasitas Kepramukaan

3.3. Pentahapan

Prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka Pencapaian tujuan sasaran perangkat daerah. Penahapan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat disajikan seperti pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pemerataan pembinaan dan pengembangan olahraga	Penguatan pembinaan dan pengembangan olahraga	Percepatan pembinaan dan pengembangan olahraga	Pemerataan dan perluasan pembinaan dan pengembangan olahraga	Keberlanjutan atlet yang kompetitif di tingkat wilayah dan nasional
Pemerataan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	Penguatan kapasitas dan pemberdayaan pemuda	Percepatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	Penyadaran, pemberdayaan pengembangan pemuda berkelanjutan	Pemuda mandiri, berdaya saing dan siap berperan aktif di masyarakat

3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 – 2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target dan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, rumusan arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dipaparkan pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perumusan Arah dan Kebijakan Renstra PD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Ekonomi Mandiri Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial 	Peningkatan pembangunan keolahragaan	Terlaksananya IPTEK Keolahragaa	
			Terlaksananya Pemusataan Latihan Daerah	
			Terlaksananya Peningkatan Kompetensi tenaga Keolahragaa	
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan	
			Terlaksananya Standarisasi Organisasi	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Prestasi Olahraga 		Terlaksananya Pengembangan dan Pemberian	
		Terlaksananya Kejuaraan Olahraga		
		Terlaksananya Keikutsertaan pada Kejuaraan Olahraga Tingkat Wilayah dan Nasional		
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana Olahraga		
		Terlaksananya Pemanfaatan Sarana Prasarana Olahraga		
		Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	Terlaksananya pemuda yang diberikan pengetahuan tentang bahaya Narkoba/HIV/AIDS	
	Terlaksananya peningkatan Kualitas Kewirausahaan muda			
	Terlaksananya jambore dan bakti pemuda antar daerah provinsi			
	Terlaksananya jambore dan bakti pemuda antar daerah provinsi			
	Terlaksananya Penyediaan sarana prasarana Kepemudaan			
	Terlaksananya peningkatan kapasitas kepramukaan provinsi			
	Terlaksananya peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan provinsi			
	Meningkatkan sumber daya manusia kepramukaan			
	Meningkatkan Sarana Prasarana Aktivitas Kepramukaan			
	Meningkatkan pembinaan organisasi pramuka			

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**



4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output (*cascading* terlampir). Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan. Mengacu Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau disajikan dengan Tabel 4.1 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.19.000.000.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Sehat dan Produktif	Meningkatkan Peran Pemuda Dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga				Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)			
		Meningkatkan Atlet Yang Kompetitif Di Tingkat Wilayah dan Nasional	Meningkatkan Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang kompetitif di even tingkat wilayah dan nasional (Orang)	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
					Meningkatkan Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus (Dokumen)	2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
						Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia (Unit)	2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus (Dokumen)	2.19.03.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus		
					Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia (Unit)	2.19.03.1.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi		

1	2	3	4	5	6	7	8
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Terselenggaranya Kejuaraan olahraga Tingkat Daerah dan keikutsertaan Provinsi Riau Pada Kejuaraan Olahraga Tingkat Wilayah dan Nasional	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan olahraga (Orang)	2.19.03.1.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	
					Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara (Kegiatan)	2.19.03.1.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	
					Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi (Kegiatan)	2.19.03.1.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	
					Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan olahraga (Orang)	2.19.03.1.02.0004 - Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
					Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi (Kegiatan)	2.19.03.1.02.0005 - Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	
					Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara (Kegiatan)	2.19.03.1.02.0006 - Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	
				Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	2.19.03.1.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	
					Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi (Dokumen)	2.19.03.1.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	
					Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	2.19.03.1.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	
					Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) (Pelatda)	2.19.03.1.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	2.19.03.1.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	
					Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	2.19.03.1.03.0001 - Seleksi Atlet Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	2.19.03.1.03.0006 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
					Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) (Pelatda)	2.19.03.1.03.0007 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	
					Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi (Dokumen)	2.19.03.1.03.0008 - Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	
					Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	2.19.03.1.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	
			Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait (Dokumen)	2.19.03.1.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
					Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi (Dokumen)	2.19.03.1.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait (Dokumen)	2.19.03.1.04.0003 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	
					Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi (Dokumen)	2.19.03.1.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	
		Meningkatnya Pemuda Yang Siap Berperan Aktif di Masyarakat			Jumlah pemuda yang berperan aktif di masyarakat (Orang)		
			Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan		Jumlah organisasi pemuda yang aktif dalam pembangunan (Organisasi)		
					Persentase Pemuda yang Berdaya Saing (%)	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Terselenggaranya Penyiapan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi (Dokumen)	2.19.02.1.01 - Penyiapan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)	2.19.02.1.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	2.19.02.1.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)	2.19.02.1.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Wirasaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	2.19.02.1.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	2.19.02.1.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)	2.19.02.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)	2.19.02.1.01.0005 - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	
					Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	2.19.02.1.01.0010 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	
					Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi (Dokumen)	2.19.02.1.01.0011 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	2.19.02.1.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	
					Jumlah Wirasaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	2.19.02.1.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirasaha Muda Tingkat Provinsi	
			Terselenggaranya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi (Organisasi)	2.19.02.1.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	
					Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda (Persentase)	2.19.02.1.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	
					Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda (Persentase)	2.19.02.1.02.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda	
					Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi (Organisasi)	2.19.02.1.02.0004 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
				Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	2.19.04.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
					Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang dikelola dan dimanfaatkan (Unit)	2.19.04.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
					Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	2.19.04.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	2.19.04.1.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	
					Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	2.19.04.1.01.0004 - Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	
					Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang dikelola dan dimanfaatkan (Unit)	2.19.04.1.01.0007 - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
			Terpenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.19.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.19.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.19.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.19.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terpenuhi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.19.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.19.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			Terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.19.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.19.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.19.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.19.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tertindakannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.19.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.19.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.19.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.19.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.19.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.19.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tertindakannya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.19.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.19.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.19.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.19.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.19.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.19.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.19.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.19.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Selanjutnya hasil rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dituangkan mengacu pada Permendagri beserta pemutakhirannya yang mengatur nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 pada Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- Jumlah Program sebanyak 4 (Empat) terdiri dari 1 (Satu) Program Penunjang Urusan dan 3 (Tiga) Program Urusan.
- Jumlah Kegiatan sebanyak 14 (Empat Belas) kegiatan.
- Jumlah Sub Kegiatan sebanyak 38 sub kegiatan.

Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Mencapai Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 mengacu pada tabel 4.3. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				63.867.927.031,00		65.071.805.667,00		66.933.846.850,00		68.846.662.657,00		70.392.362.212,00			
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				29.031.396.337,00		29.558.999.932,00		30.394.623.671,00		31.250.136.453,00		32.027.582.951,00			
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	29.031.396.337,00	100	29.558.999.932,00	100	30.394.623.671,00	100	31.250.136.453,00	100	32.027.582.951,00			
2.19.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00			
2.19.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00			
2.19.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				21.154.336.677,00		22.209.759.141,00		22.837.622.127,00		23.480.429.153,00		24.064.579.479,00			
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	92	147	21.154.336.677,00	193	22.209.759.141,00	193	22.837.622.127,00	193	23.480.429.153,00	193	24.064.579.479,00			
2.19.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				21.154.336.677,00		22.209.759.141,00		22.837.622.127,00		23.480.429.153,00		24.064.579.479,00			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	92	147	21.154.336.677,00	193	22.209.759.141,00	193	22.837.622.127,00	193	23.480.429.153,00	193	24.064.579.479,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.19.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00			
Terpenuhiya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00			
2.19.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00			
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00			
2.19.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.873.119.660,00		1.265.300.791,00		1.363.061.544,00		1.495.300.791,00		1.645.000.000,00			
Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	1.873.119.660,00	2	1.265.300.791,00	2	1.363.061.544,00	2	1.495.300.791,00	2	1.645.000.000,00			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1		2		2		2		2				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	45	45		45		50		60		70				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.19.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	35.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		75.000.000,00	
2.19.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				312.134.610,00		370.000.000,00		370.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	312.134.610,00	2	370.000.000,00	2	370.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		400.000.000,00	
2.19.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				369.885.000,00		301.060.000,00		301.060.000,00		301.060.000,00		301.060.000,00		400.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	369.885.000,00	1	301.060.000,00	1	301.060.000,00	1	301.060.000,00	1	301.060.000,00		400.000.000,00	
2.19.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				64.331.050,00		69.240.791,00		69.240.791,00		69.240.791,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	64.331.050,00	2	69.240.791,00	2	69.240.791,00	2	69.240.791,00	2	69.240.791,00		70.000.000,00	
2.19.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.091.769.000,00		450.000.000,00		547.760.753,00		650.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00	
Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	45	45	1.091.769.000,00	45	450.000.000,00	50	547.760.753,00	60	650.000.000,00	70	700.000.000,00		700.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		PAGU		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.19.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00			
Terlaksananya Pengadaan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		10	5	70.000.000,00	7	70.000.000,00	7	70.000.000,00	7	70.000.000,00	10	70.000.000,00			
2.19.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00			
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		10	5	70.000.000,00	7	70.000.000,00	7	70.000.000,00	7	70.000.000,00	10	70.000.000,00			
2.19.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.329.720.000,00		5.219.720.000,00		5.329.720.000,00		5.349.720.000,00		5.329.720.000,00			
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		22	22	5.329.720.000,00	22	5.219.720.000,00	22	5.329.720.000,00	22	5.349.720.000,00	22	5.329.720.000,00			
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	12		12		12		12		12				
2.19.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.600.000.000,00		2.600.000.000,00		2.600.000.000,00		2.620.000.000,00		2.600.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		PAGU		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	22	22	2.600.000.000,00	22	2.600.000.000,00	22	2.600.000.000,00	22	2.620.000.000,00	22	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00		
2.19.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			2.729.720.000,00		2.619.720.000,00		2.729.720.000,00		2.729.720.000,00		2.729.720.000,00	2.729.720.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.729.720.000,00	12	2.619.720.000,00	12	2.729.720.000,00	12	2.729.720.000,00	12	2.729.720.000,00	2.729.720.000,00		
2.19.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			529.220.000,00		609.220.000,00		609.220.000,00		609.220.000,00		644.686.509,00	708.283.472,00		
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	529.220.000,00	1	609.220.000,00	1	609.220.000,00	1	644.686.509,00	1	708.283.472,00	708.283.472,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60	60		60		60		60		60				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya (Unit)	8	8		8		8		8		8				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.19.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				41.730.000,00		41.730.000,00		41.730.000,00		41.730.000,00		41.730.000,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan	1	1	41.730.000,00	1	41.730.000,00	1	41.730.000,00	1	41.730.000,00	1	41.730.000,00			
2.19.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				288.480.000,00		288.480.000,00		288.480.000,00		288.480.000,00		288.480.000,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		8	288.480.000,00	8	288.480.000,00	8	288.480.000,00	8	288.480.000,00	8	288.480.000,00			
2.19.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60	60	40.000.000,00	60	40.000.000,00	60	40.000.000,00	60	40.000.000,00	60	40.000.000,00			
2.19.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				159.010.000,00		239.010.000,00		239.010.000,00		274.476.509,00		338.073.472,00			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	159.010.000,00	1	239.010.000,00	1	239.010.000,00	1	274.476.509,00	1	338.073.472,00			
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				3.208.296.076,00		2.729.550.557,00		2.853.447.536,00		2.981.072.656,00		3.073.807.082,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Berdaya Saing (%)	0	0,022	3.208.296.076,00	0,016	2.729.550.557,00	0,016	2.853.447.536,00	0,018	2.981.072.656,00	0,019	3.073.807.082,00			
2.19.02.1.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi				2.708.315.076,00		2.274.210.777,00		2.398.107.756,00		2.525.732.876,00		2.613.807.082,00			
Terselenggaranya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)	465	200	2.708.315.076,00	200	2.274.210.777,00	200	2.398.107.756,00	200	2.525.732.876,00	200	2.613.807.082,00			
	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	10	10		10		10		10		10				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Wirasaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	150	150		100		100		100		100				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN			
			2026			2027			2028			2029				2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	14	
Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)																		
2.19.02.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi			999,995,860,00	700,000,000,00	750,000,000,00	750,000,000,00	750,000,000,00	750,000,000,00	750,000,000,00	750,000,000,00	750,000,000,00	750,000,000,00	750,000,000,00	750,000,000,00	750,000,000,00	800,000,000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
2.19.02.1.01.0005 - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi			558.591.216,00	569.210.777,00	569.210.777,00	569.210.777,00	569.210.777,00	569.210.777,00	569.210.777,00	569.210.777,00	569.210.777,00	569.210.777,00	569.210.777,00	569.210.777,00	569.210.777,00	650.000.000,00		
Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2.19.02.1.01.0010 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda			249.995.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	250.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1 2.19.02.1.01.0011 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	2	3		149.996.000,00		130.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00				14
Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi (Dokumen)	1	1	149.996.000,00	1	130.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		150.000.000,00	
2.19.02.1.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi				199.852.000,00		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			200.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	10	10	199.852.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00		200.000.000,00	
2.19.02.1.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi				549.885.000,00		450.000.000,00	478.896.979,00	525.732.876,00	563.807.082,00					563.807.082,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		PAGU		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	150	150	5.499.885.000,00	100	450.000.000,00	100	478.896.979,00	100	525.732.876,00	100	563.807.082,00			
2.19.02.1.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi				499.981.000,00		455.339.780,00		455.339.780,00		455.339.780,00		460.000.000,00			
Terselenggaranya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda (Persentase)	0	5	499.981.000,00	5	455.339.780,00	5	455.339.780,00	5	455.339.780,00	5	460.000.000,00			
2.19.02.1.02.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi (Organisasi)	1	10	199.989.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		PAGU		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda (Persentase)	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda (Persentase)	0	5	199.989.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	200.000.000,00		
2.19.02.1.02.0004 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				299.992.000,00		255.339.780,00		255.339.780,00		255.339.780,00		260.000.000,00	260.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi (Organisasi)	1	10	299.992.000,00	10	255.339.780,00	10	255.339.780,00	10	255.339.780,00	10	260.000.000,00	260.000.000,00		
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				31.278.245.100,00		31.935.900.748,00		32.824.924.003,00		33.740.698.559,00		34.406.114.797,00	34.406.114.797,00		
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	3,28	2,7	31.278.245.100,00	2,7	31.935.900.748,00	2,6	32.824.924.003,00	2,5	33.740.698.559,00	2,5	34.406.114.797,00	34.406.114.797,00		
2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				6.078.579.598,00		8.095.900.748,00		8.095.900.748,00		8.095.900.748,00		8.856.114.797,00	8.856.114.797,00		
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia (Unit)	14	14	6.078.579.598,00	14	8.095.900.748,00	14	8.095.900.748,00	14	8.095.900.748,00	14	8.856.114.797,00	8.856.114.797,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus (Dokumen)	0	1	173.919.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00			
2.19.03.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus (Dokumen)														
Terselenggaranya Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus (Dokumen)	0	1	173.919.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00			
2.19.03.1.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia (Unit)	14	14	5.904.660.598,00	14	7.895.900.748,00	14	7.895.900.748,00	14	7.895.900.748,00	14	8.606.114.797,00			
Terlaksananya penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia (Unit)	14	14	5.904.660.598,00	14	7.895.900.748,00	14	7.895.900.748,00	14	7.895.900.748,00	14	8.606.114.797,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.19.03.1.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga				21.847.558.290,00		6.450.000.000,00		7.339.023.255,00		8.254.797.811,00		6.600.000.000,00			
Terselenggaranya Kejuaraan olahraga Tingkat Daerah dan keikutsertaan Provinsi Riau Pada Kejuaraan Pekan dan Penyelenggaraan Olahraga Tingkat Wilayah dan Nasional	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga [Orang]	137	180	21.847.558.290,00	364	6.450.000.000,00	217	7.339.023.255,00	407	8.254.797.811,00	217	6.600.000.000,00			
2.19.03.1.02.0004 - Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi (Kegiatan)	1	1				1		1		1				
2.19.03.1.02.0005 - Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Nasional dan Provinsi yang terselenggara (Kegiatan)	1	2		9		10		9		10				
Terlaksananya keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga [Orang]			2.790.570.748,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.915.774.556,00		3.000.000.000,00			
Terselenggaranya Pekan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga [Orang]	137	180	2.790.570.748,00	364	4.000.000.000,00	217	4.000.000.000,00	407	4.915.774.556,00	217	3.000.000.000,00			
Terselenggaranya Pekan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi (Kegiatan)	1	1	629.222.407,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		600.000.000,00			
Terselenggaranya Pekan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi (Kegiatan)	1	1	629.222.407,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	600.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		PAGU		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.19.03.1.02.0006 - Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi				18.427.765.135,00		2.000.000.000,00		2.889.023.255,00		2.889.023.255,00		3.000.000.000,00			
Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara (Kegiatan)	1	2	18.427.765.135,00	9	2.000.000.000,00	10	2.889.023.255,00	9	2.889.023.255,00	10	3.000.000.000,00			
2.19.03.1.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional				3.163.890.951,00		4.690.000.000,00		4.690.000.000,00		4.690.000.000,00		6.250.000.000,00			
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	0	7	3.163.890.951,00	20	4.690.000.000,00	20	4.690.000.000,00	20	4.690.000.000,00	20	6.250.000.000,00			
	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) (Pelatda)	1	1				1		1		1				
	Jumlah penerima Penghargaan olahragawan (Orang)	20	7				7		7		7				
	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	80	200				200		230		320				
	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi (Dokumen)	1	1				1		1		1				
2.19.03.1.03.0001 - Seleksi Atlet Daerah				1.64.304.420,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Terselenggaranya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	80	200	164.304.420,00	300	200.000.000,00	200	200.000.000,00	230	200.000.000,00	320	250.000.000,00			
2.19.03.1.03.0006 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga				269.630.567,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00			
Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	20	7	269.630.567,00	7	300.000.000,00	7	300.000.000,00	7	300.000.000,00	7	300.000.000,00			
2.19.03.1.03.0007 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga (Sport Science)				1.879.324.516,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		3.000.000.000,00			
Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga (Pelatda)	1	1	1.879.324.516,00	1	2.500.000.000,00	1	2.500.000.000,00	1	2.500.000.000,00	1	3.000.000.000,00			
2.19.03.1.03.0008 - Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi				185.560.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00			
Tersedianya data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi (Dokumen)	1	1	185.560.000,00	1	190.000.000,00	1	190.000.000,00	1	190.000.000,00	1	200.000.000,00			
2.19.03.1.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berprestasi Provinsi				665.071.448,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		2.500.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		14		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Penghargaan (Orang)	0	7	665.071.448,00	20	1.500.000.000,00	20	1.500.000.000,00	20	1.500.000.000,00	20	2.500.000.000,00			
2.19.03.1.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahragawan				188.216.261,00		12.700.000.000,00		12.700.000.000,00		12.700.000.000,00		12.700.000.000,00			
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahragawan	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi (Dokumen)	0	1	188.216.261,00	1	12.700.000.000,00	1	12.700.000.000,00	1	12.700.000.000,00	1	12.700.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait (Dokumen)	3	3		3		3		3		3				
2.19.03.1.04.0003 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				13.215.000,00		12.500.000.000,00		12.500.000.000,00		12.500.000.000,00		12.500.000.000,00			
Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait (Dokumen)	3	3	13.215.000,00	3	12.500.000.000,00	3	12.500.000.000,00	3	12.500.000.000,00	3	12.500.000.000,00			
2.19.03.1.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi				175.001.261,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		PAGU		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Terlaksananya Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi (Dokumen)	0	1	175.001.261,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	200.000.000,00		
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				349.989.518,00		847.354.430,00		860.851.640,00		874.754.989,00		884.857.382,00	884.857.382,00		
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	3,45	3,45	349.989.518,00	3,45	847.354.430,00	3,45	860.851.640,00	3,45	874.754.989,00	3,45	884.857.382,00	884.857.382,00		
2.19.04.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				349.989.518,00		847.354.430,00		860.851.640,00		874.754.989,00		884.857.382,00	884.857.382,00		
Terseleenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	50	349.989.518,00	50	847.354.430,00	50	860.851.640,00	50	874.754.989,00	50	884.857.382,00	884.857.382,00		
	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang dikelola dan dimanfaatkan	0	0		1		1		1		1				
2.19.04.1.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi				49.999.998,00		522.354.430,00		535.851.640,00		549.754.989,00		550.000.000,00	550.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	1	1	49.999.998,00	1	522.354.430,00	1	535.851.640,00	1	549.754.989,00	1	550.000.000,00			
2.19.04.1.01.0004 - Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi				299.989.520,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		259.857.382,00			
Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	50	299.989.520,00	50	250.000.000,00	50	250.000.000,00	50	250.000.000,00	50	259.857.382,00			
2.19.04.1.01.0007 - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi				0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00			
Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang dikelola dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	0,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00			

Adapun Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah disajikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1.	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	2.19.02.1.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 2.19.02.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi 2.19.02.1.01.0005 - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi 2.19.02.1.01.0010 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda 2.19.02.1.01.0011 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi 2.19.02.1.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi 2.19.02.1.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi 2.19.02.1.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 2.19.02.1.02.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda 2.19.02.1.02.0004 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi mengacu pada Tabel 4.5. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.4. IKU Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau sedangkan Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Untuk target capaian IKU Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2025-2030 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA									
2.	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	55,17	55,17	55,17	55,17	55,65	55,58	56	
3.	Jumlah Atlit yang Berprestasi Ditingkat Wilayah dan Nasional	Orang	298	63	93	264	298	78	102	
4.	Jumlah Atlet yang kompetitif di even tingkat wilayah dan nasional	Orang	620	243	180	581	710	407	217	
5.	Jumlah pemuda yang berperan aktif di masyarakat	Orang	391	460	420	320	320	350	370	
6.	Jumlah organisasi pemuda yang aktif dalam pembangunan	Organisasi	10	10	10	10	10	10	10	
7.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	68,05	68,05	69,55	70,46	70,86	71,48	71,50	

Selanjutnya Indikator Kinerja Kunci Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2025-2030 disajikan pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA										
2.	Tingkat Partisipasi asyarakat dalam Kepramukaan	positif	Persentase	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	
3.	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	positif	Persentase	3,28	3,28	2,7	2,7	2,6	2,5	2,5	
4.	Persentase Pemuda yang Berdaya Saing	positif	%	0	0,027	0,022	0,016	0,016	0,018	0,019	Indikator baru



PROVINSI RIAU

Penutup Bab V

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau merupakan dokumen perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dengan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau tergantung pada komitmen, sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau untuk melaksanakan program ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian hasil pembangunan bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat diterima secara lebih adil dan merata untuk masyarakat.

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau yang mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

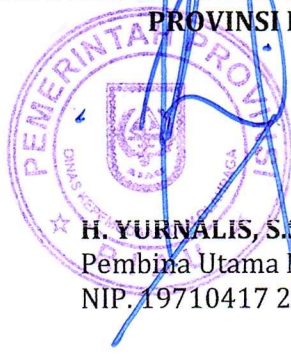
RENSTRA DISPORA PROV. RIAU TAHUN 2025 – 2029

Renstra ini selanjutnya menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau sekaligus sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran

Akhir kata semoga Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Pekanbaru, 28 Oktober 2025

**KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI RIAU**



H. YURNALIS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710417 200212 1 006

LAMPIRAN



GUBERNUR RIAU

**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 276/III/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR RIAU,

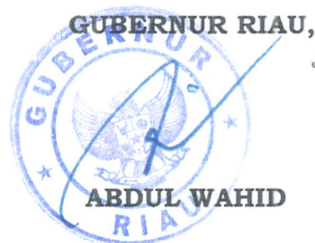
- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029, diperlukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan Renstra meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025–2029;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Koordinator;
 - e. Anggota.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Riau.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 MARET 2025



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 276/III/2025
 TANGGAL : 19 Maret 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
 TAHUN 2025 – 2029

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pendidikan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pendidikan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas	Dinas Pendidikan	Anggota
4	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Dinas Pendidikan	Anggota
5	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Dinas Pendidikan	Anggota
6	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	Anggota
7	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Dinas Pendidikan	Anggota
8	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Dinas Pendidikan	Anggota
9	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Dinas Pendidikan	Anggota
10	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Dinas Pendidikan	Anggota
11	Perencana Ahli Madya	Dinas Pendidikan	Anggota
12	Perencana Ahli Muda	Dinas Pendidikan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pendidikan	Koordinator
2	Perencana Ahli Pertama	Dinas Pendidikan	Anggota
3	Pranata Komputer	Dinas Pendidikan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pendidikan	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pendidikan	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat	Dinas Pendidikan	Anggota
7	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pendidikan	Anggota
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kesehatan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kesehatan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian	Dinas Kesehatan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	Anggota
8	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
10	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	Dinas Kesehatan	Anggota
11	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Dinas Kesehatan	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Pecegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Anggota
13	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana	Dinas Kesehatan	Anggota
14	Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
16	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Dinas Kesehatan	Anggota
17	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
19	Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
20	Fungsional Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
21	Fungsional Nutrisionis Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
22	Pembimbing Kesehatan kerja Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
23	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan	Anggota
UPT Balai Pelatihan Kesehatan			
1	Kepala UPT Balai Pelatihan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Pengkajian, Pengembangan dan pengendalian Mutu	Dinas Kesehatan	Anggota
UPT Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan			
1	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Pelayanan Klinis	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Penata Laboratorium Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Penelaah Kebijakan Teknis	Dinas Kesehatan	Anggota
UPT Instalasi Farmasi Dan Logistik			
1	Kepala UPT Instalasi Farmasi dan Logistik	Dinas Kesehatan	Anggota
2	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Logistik Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Instalasi Farmasi	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Apoteker Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan	Anggota
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD			
1	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Perencanaan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
3	Wakil Direktur Keuangan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
4	Wakil Direktur Medik dan Keperawatan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
5	Wakil Direktur Umum, SDM dan Pendidikan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
6	Fungsional Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN			
1	Direktur	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Perencanaan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
3	Wakil Direktur Medik dan Keperawatan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
4	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
7	Pelaksana Program Perencanaan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI			
1	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Tata Usaha	RSUD Petala Bumi	Anggota
3	Kepala Bidang Pelayanan Medik	RSUD Petala Bumi	Anggota
4	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang	RSUD Petala Bumi	Anggota
5	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan	RSUD Petala Bumi	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	RSUD Petala Bumi	Anggota
7	Fungsional Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	RSUD Petala Bumi	Anggota
8	Pelaksana Program Perencanaan	RSUD Petala Bumi	Anggota
9	Pelaksana Program Keuangan	RSUD Petala Bumi	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Kesehatan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Kesehatan	Anggota
8	Penelaah Kebijakan Teknis	Dinas Kesehatan	Anggota
9	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Kesehatan	Anggota
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
4	Kepala Bidang Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
6	Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
7	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
8	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
9	Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
10	Kepala UPT Pengelolaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
11	Kepala UPT Peralatan Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
12	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
13	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
14	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
15	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
16	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
17	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
18	Perencana Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
19	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
20	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
3	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Satuan	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
2	Sekretaris	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4	Kepala Bidang Operasi	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
6	Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
7	Kepala Seksi Bina Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8	Kepala Seksi Peningkatan Fasilitas Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9	Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
10	Kepala Seksi Pengamanan Asset	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
11	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
12	Kepala Seksi Penegakan dan Pengawasan	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
13	Kepala Seksi Data dan Informasi	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
14	Kepala Seksi Pengarahan dan Pengendalian	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Muda	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
7	Pengadministrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Ketua
2	Sekretaris	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
6	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
7	Fungsional Analis Kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
8	Fungsional Penata Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Program Perencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
3	Ketua Tim Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
4	Perencana Ahli Pertama	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
6	Pengolah Data dan Informasi Sekretariat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Sosial	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Sosial	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Sosial	Dinas Sosial	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Dan Korban Perdagangan Orang	Dinas Sosial	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Perorangan Pemberdayaan dan Keluarga	Dinas Sosial	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan masyarakat dan Kelembagaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Identifikasi dan Pengolahan Data Fakir miskin	Dinas Sosial	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pendampingan dan Pemberdayaan	Dinas Sosial	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan	Dinas Sosial	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Dinas Sosial	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Dinas Sosial	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Jaminan Sosial Keluarga	Dinas Sosial	Anggota
18	Penyuluh Sosial Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Sosial	Anggota
19	Pekerja Sosial Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Sosial	Anggota
UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha "Khusnul Khotimah"			
1	Kepala UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha, "Khusnul Khotimah"	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Pembinaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra "Tengku Yuk"			
1	Kepala UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra "Tengku Yuk"	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Bina Laras			
1	Kepala UPT Bina Laras	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak			
1	Kepala UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Kepala Seksi Pelayanan sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas			
1	Kepala UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Pembinaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Dinas Sosial	Anggota
6	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Sosial	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Sosial	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Dinas Sosial	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Sosial	Anggota
7	Pengadministrasi Perencana dan Program	Dinas Sosial	Anggota
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris
3	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
4	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
5	Kepala Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
6	Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
7	Fungsional Pengantar Kerja Muda	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
8	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
9	Kepala Seksi Persyaratan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
10	Kepala Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
11	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
12	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
13	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Kepala Seksi Pengawasan Norma, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
15	Kepala Seksi Penegakan Hukum	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
16	Fungsional Pengawas KK Ahli Madya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
17	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
18	Kepala Bidang Ketransmigrasian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
19	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
20	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
UPT Latihan Kerja			
1	Kepala UPT Latihan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
3	Kepala Seksi Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Koordinator
2	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
3	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penduduk dan Keluarga Berencana	
5	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
6	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
7	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Data dan Informasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
8	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
5	Pengolah Data dan Informasi Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sekretaris
3	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
4	Kepala Bidang Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
6	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
7	Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
8	Kepala UPT Perbenihan Sertifikst Benih Tanaman Pangan Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
9	Kepala UPT Pelatihan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
10	Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
11	Kepala Seksi Produksi Benih	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
4	Perencana Ahli Madya	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Perencana Ahli Muda	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
6	Perencana Ahli Pertama	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
4	Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
6	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
7	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
8	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
9	Kepala UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
10	Kepala UPT Perbenihan Tanaman Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
11	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Minas Tahura	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
12	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tasik Besar Serkap	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
13	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bagan Siapi-api	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
14	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bengkalis Pulau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
15	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
16	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
17	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Suligi - Batu Gajah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
18	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kampar Kiri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
19	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
20	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tebing Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
21	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
22	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Indragiri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
23	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
24	Perencana Ahli Madya	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
25	Perencana Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
4	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
3	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4	Ketua Tim Kerja Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Peningkatan Sumberdaya Manusia Lembaga Kemasyarakatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Ketua Tim Kerja Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9	Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
5	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
8	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perhubungan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perhubungan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pelayaran	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Bidang Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	Anggota
5	Kepala Bidang Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
7	Kepala Seksi Kepelabuhanan	Dinas Perhubungan	Anggota
8	Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP	Dinas Perhubungan	Anggota
9	Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek	Dinas Perhubungan	Anggota
10	Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana	Dinas Perhubungan	Anggota
11	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Anggota
12	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	Dinas Perhubungan	Anggota
13	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
14	Kepala Seksi Regulasi dan Pendataan Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I			
1	Kepala UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
2	Kepala Seksi Operasional UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II			
1	Kepala UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
2	Kepala Seksi Operasional UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Perhubungan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Pejabat Pengurus Barang Milik Daerah	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Analisis Kebijakan	Dinas Perhubungan	Anggota
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
3	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
4	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
5	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
6	Kepala Bidang Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
7	Kepala Bidang Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
8	Perencana Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
9	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
10	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
11	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
12	Manggala Informatika Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
13	Statistisi Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
Sekretariat			

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
4	Arsiparis Ahli Madya	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
3	Perencana Ahli Madya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
4	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
6	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
7	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan A	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
8	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan B	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
9	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan C	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
10	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Umum	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
3	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
4	Perencana Ahli Pertama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sekretaris
3	Kepala Bidang Layanan dan Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
4	Kepala Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
5	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
6	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
3	Pranata Komputer Ahli Pertama	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kebudayaan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kebudayaan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Bahasa dan Seni	Dinas Kebudayaan	Anggota
4	Kepala Bidang Sejarah Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Dinas Kebudayaan	Anggota
5	Kepala Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota
6	Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota
7	Kepala UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Pamong Budaya Madya	Dinas Kebudayaan	Anggota
9	Pamong Budaya Muda	Dinas Kebudayaan	Anggota
10	Pamong Budaya Pertama	Dinas Kebudayaan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Kebudayaan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kebudayaan	Anggota
3	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Dinas Kebudayaan	Anggota
4	Analisis Perencanaan dan Anggaran	Dinas Kebudayaan	Anggota
5	Pelaksana Program dan Kegiatan	Dinas Kebudayaan	Anggota
6	Analisis Kebijakan	Dinas Kebudayaan	Anggota
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
4	Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
5	Kepala Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
6	Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
7	Pustakawan Ahli Madya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
8	Arsiparis Ahli Madya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
9	Pustakawan Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
10	Arsiparis Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
11	Perencana Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
5	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
6	Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
7	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
8	Kepala UPT Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
9	Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
10	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah I	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
11	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah II	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
12	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah III	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
13	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
14	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
15	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
16	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
17	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
18	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
19	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
20	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
21	Kepala Sub Bagian Tata usaha UPT Pelabuhan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
22	Kepala Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
23	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
24	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
25	Kepala Seksi Teknis Pembenihan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
26	Kepala Seksi Teknis Pembudidayaan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
27	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
28	Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
29	Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
30	Kepala Seksi Kerja sama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
31	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
32	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah I	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
33	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah II	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
34	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah III	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pariwisata	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pariwisata	Sekretaris
3	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
5	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Objek Daya Tarik Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Dinas Pariwisata	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Ketua Tim Kerja Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata (Pendampingan Desa Wisata, ADWR dan ADWI dan Pelatihan Pengelola Desa Wisata)	Dinas Pariwisata	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata (Pelatihan Kepariwisata)	Dinas Pariwisata	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Fasilitasi Sertifikasi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Pelaku Usaha Jasa Pariwisata)	Dinas Pariwisata	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Promosi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Pengembangan Pasar Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Sarana Promosi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
UPT Bandar Serai			
1	Kepala UPT Bandar Serai	Dinas Pariwisata	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Pariwisata	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan	Dinas Pariwisata	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pariwisata	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pariwisata	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Substansi Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Pariwisata	Anggota
5	Pranata Komputer Terampil	Dinas Pariwisata	Anggota
6	Operator Layanan Operasional	Dinas Pariwisata	Anggota
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perkebunan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perkebunan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Produksi	Dinas Perkebunan	Anggota
4	Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan	Dinas Perkebunan	Anggota
5	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	Dinas Perkebunan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
7	Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
8	Kepala UPT Pengawasan dan sertifikasi Benih Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
9	Perencana Ahli Madya	Dinas Perkebunan	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perkebunan	Koordinator
2	Ketua Tim Keuangan dan Aset	Dinas Perkebunan	Anggota
3	Perencana Ahli Muda	Dinas Perkebunan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat	Dinas Perkebunan	Anggota
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Produksi Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
4	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
5	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
6	Kepala Bidang Agribisnis	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
7	Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8	Kepala UPT Inseminasi Buatan Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
9	Kepala UPT Pengembangan Ternak dan Pakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
10	Medik Veteriner Ahli Madya	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
11	Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
12	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
13	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
14	Medik Veteriner Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
15	Perencana Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
16	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
17	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
18	Perencana Ahli Pertama	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
Sekretariat			

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretaris
3	Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
4	Kepala Bidang Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
5	Kepala Bidang Mineral dan Batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
6	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
7	Kepala Cabang Dinas Wilayah I	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
8	Kepala Cabang Dinas Wilayah II	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
9	Kepala Cabang Dinas Wilayah III	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
10	Kepala Cabang Dinas Wilayah IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
11	Kepala UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
12	Kepala Sub Bagian TU Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
13	Kasi Pengeolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
14	Kasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
15	Kepala Sub Bagian TU UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
16	Kasi Pengujian UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
17	Kasi Pelayanan dan Pengembangan Peralatan Laboratorium	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Koordinator
2	Perencana Ahli Pertama Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Kerjasama dan Promosi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
4	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
5	Kepala Bidang Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
6	Kepala Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
7	Kepala Bidang Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
8	Kepala UPT Industri Pangan, Olahan dan Kemasan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
9	Kepala UPT Logam	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
10	Kepala UPT Penguji dan Sertifikasi Mutu Barang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
11	Kepala UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
12	Kepala UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
Sekretariat			
1	Fungsional Ahli Muda	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koordinator
2	Fungsional Ahli Pertama	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua I
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua II
4	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua III
5	Kepala Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Sekretaris
6	Kepala Biro Umum	Sekretariat Daerah	Anggota
7	Kepala Biro Organisasi	Sekretariat Daerah	Anggota
8	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Anggota
9	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Anggota
10	Kepala Biro Hukum	Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kepala Biro Perekonomian	Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Anggota
13	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Koordinator

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan (Ketua Tim Perencanaan dan Pelaporan)	Sekretariat Daerah	Anggota
3	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum	Sekretariat Daerah	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi	Sekretariat Daerah	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Anggota
10	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum	Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian	Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Anggota
14	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
15	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
16	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Sekretaris Dewan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ketua
2	Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
4	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Protokol	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Koordinator
2	Ketua Tim Kerja Keuangan dan Perjalanan Dinas	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Verifikasi dan Pelaporan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
4	Ketua Tim Kerja Komisi, Fraksi dan Hubungan Antar Lembaga	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
5	Ketua Tim Kerja Produk Hukum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Rapat dan Risalah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Rumah Tangga, Perlengkapan dan PBMD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Humas dan Perpustakaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7	Perencana Ahli Utama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
8	Perencana Ahli Madya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10	Perencana Ahli Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11	Ketua Tim Perencanaan dan Pendanaan Bidang Perencanaan,	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		
12	Ketua Tim Data dan Informasi Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
13	Ketua Tim Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14	Ketua Tim Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
15	Ketua Tim Pendidikan, Budaya dan Pemuda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
16	Ketua Tim Kesehatan dan Keluarga Berencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
17	Ketua Tim Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
18	Ketua Tim Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
19	Ketua Tim Pariwisata Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
20	Ketua Tim Tata Ruang dan Pertanahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
21	Ketua Tim Pekerjaan Umum dan Perumahan Kawasan Permukiman Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
22	Ketua Tim Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Pendapatan Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Retribusi, PADL dan dana Bagi Hasil	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
6	Kepada Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Substansi Pengolahan Data dan Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Substansi Perencanaan Program	Badan Pendapatan Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Substansi Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
6	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Pengolah data dan Informasi	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
7	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Pertama	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
8	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9	Pengolah Data Dan Informasi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Substansi Perencanaan Program	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
3	Kepala Tim Substansi Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Kepegawaian Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Mutasi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Perencanaan dan Pengadaan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
8	Ketua Tim Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
9	Ketua Tim Pemberhentian dan Pensiun	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
10	Ketua Tim Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
11	Ketua Tim Penataan Jabatan Fungsional	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Ketua Tim Kepangkatan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
13	Ketua Tim Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
14	Ketua Tim Pengembangan Pendidikan Formal	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
15	Ketua Tim Pengembangan Kompetensi Manajerial, Teknis dan Fungsional	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
16	Ketua Tim Penghargaan dan Penilaian Kinerja	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
17	Ketua Tim Disiplin dan Pengawasan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
18	Ketua Tim Pendayagunaan dan Evaluasi Organisasi Profesi ASN	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
19	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
20	Kepala Seksi Pengembangan Penilaian Kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
21	Kepala Seksi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Kepegawaian Daerah	Koordinator
2	Perencana Ahli Muda	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
3	Perencana Ahli Pertama	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjamin Mutu	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Dan Fungsional	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Dan Sosiokultural	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
7	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Kerja Sistem Informasi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Kerja Pengelolaan Sumber Belajar, Kerjasama dan Penjamin Mutu	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
15	Ketua Tim Pengembangan Kompetensi Dasar dan Kader	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrator Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrator Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Pengembangan Integritas dan Sosiokultural Jabatan Administrator Perangkat Daerah Penunjang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
19	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Jabatan Administrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
20	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan dan Jabatan Administrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
21	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Widyaiswara Ahli Utama	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Widyaiswara Ahli Madya	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Penghubung	Ketua
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Badan Penghubung	Sekretaris
3	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga	Badan Penghubung	Anggota
4	Kepala Sub Bidang Humas dan Protokol	Badan Penghubung	Anggota
5	Kepala Sub Bidang Pengelola Anjungan Riau	Badan Penghubung	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penghubung	Anggota
Sekretariat			
1	Fungsional Perencana Ahli Muda	Badan Penghubung	Koordinator
2	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Badan Penghubung	Anggota
3	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penghubung	Anggota
4	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Penghubung	Anggota
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Inspektur Daerah	Inspektorat Daerah	Ketua
2	Sekretaris	Inspektorat Daerah	Sekretaris
3	Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V	Inspektorat Daerah	Anggota
4	Fungsional Auditor Ahli Madya, Muda Pertama, dan Penyelia, Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan	Inspektorat Daerah	Anggota
5	Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama, Madya, Muda dan Pertama	Inspektorat Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan	Inspektorat Daerah	Koordinator
2	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Inspektorat Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Analisa dan Evaluasi	Inspektorat Daerah	Anggota
4	Fungsional Arsiparis Madya	Inspektorat Daerah	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Muda	Inspektorat Daerah	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Inspektorat Daerah	Anggota
7	Pengelola Program dan Kegiatan	Inspektorat Daerah	Anggota
8	Pengolah Data dan Informasi	Inspektorat Daerah	Anggota
9	Pengadministrasi Perkantoran	Inspektorat Daerah	Anggota
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
3	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
7	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
8	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
5	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
7	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Ketua
2	Sekretaris	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Sekretaris
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Koordinator
2	Fungsional Peneliti Ahli Madya	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
3	Fungsional Peneliti Ahli Pertama	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
4	Fungsional Perekayasa Ahli Madya	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
5	Fungsional Perekayasa Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
6	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
UPT Riau Science Techno Park			
1	Kepala UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
3	Kepala Seksi Riset dan Inovasi Teknologi UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
4	Kepala Seksi Inkubasi Teknologi dan Bisnis UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 276/III/2025
 TANGGAL : 19 Maret 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
1	Ketua	Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan, Sekretaris Dewan	<ol style="list-style-type: none"> Memimpin Tim penyusun Renstra dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan Renstra
2	Wakil Ketua	Asisten Sekretariat Daerah, Direktur Rumah Sakit	Membantu Ketua Tim penyusun Renstra dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat Daerah
3	Sekretaris	Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Kepala Biro	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dari rancangan awal sampai dengan penetapan Renstra Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Mengkoordinasikan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Strategis
4	Koordinator	Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Perencana Ahli Muda/Madya	Menyiapkan materi pendukung/orientasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah

NO 1	KEDUDUKAN DALAM TIM 2	JABATAN 3	TUGAS 4
5	Anggota	Kepala Bidang, Kepala UPT, Fungsional, Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun tujuan, sasaran, program, outcome, kegiatan, output dan sub kegiatan beserta indikator dan target perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan bidang Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif 2. Menghimpun data yang diperlukan dalam penyusunan Renstra sesuai dengan sistematika; 3. Melaksanakan perbaikan atas verifikasi rancangan dan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan melakukan penajaman rancangan akhir Renstra sebelum dilakukan penetapan Renstra Perangkat Daerah





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jalan Dr. Sutomo No. 114 Telp. (0761) 38830 – 23369

PEKANBARU 28141

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA PROVINSI RIAU

Nomor : KPTS. 579 / Dispora / VI / 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
PROVINSI RIAU NOMOR KPTS. 379/DISPORAV/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2029**

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Nomor Kpts. 379/Dispora/V/2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) .
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
5. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Perubahan Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas :
- Melakukan Pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta melakukan evaluasi rencana pembangunan tahun sebelumnya;
 - Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Pusat dan instansi terkait;
 - Menyusun agenda kerja penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2025-2029;
 - Melakukan analisis dan pengkajian hasil evaluasi rencana pembangunan tahun sebelumnya, untuk penentuan isu-isu strategis, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah; dan
 - Terlibat secara penuh dalam pembahasan dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 Juni 2025

**KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA
PROVINSI RIAU**



H. ERISMAN YAHYA, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19761130 200112 1 003

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
 Nomor : Kpts. 579 / Dispora / VI / 2025
 Tanggal : 5 Juni 2025

**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 PROVINSI RIAU NOMOR KPTS. 379/DISPORA/V/2025 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 (RENSTRA) DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU
 TAHUN 2025-2029**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	H. ERISMAN YAHYA, MH	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Pembina Utama Muda NIP. 19761130 200112 1 003	KETUA	
2	NUR HAMDI, ST	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Pembina NIP. 19710610 200003 1 000	SEKRETARIS	
3	HELFANDI, SE, M. Si	Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Pembina Tingkat I NIP. 19790403 2000212 1 005	ANGGOTA	
4	RINOV EKA MONDRIE, S. STP, M. Si	Kepala Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga Pembina Tingkat I NIP. 19801110 199912 1 001	ANGGOTA	
5	AMIR AZAN, SKM, M.Si	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Pembina Tingkat I NIP. 19700224 199503 1 001	ANGGOTA	
6	ANDRE KURNIAWAN, ST	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan Pembina NIP. 19790801 200902 1 005	ANGGOTA	
7	DIPA RESKITAMA, ST, M. Si	Ketua Tim Perencana Program / Perencana Ahli Muda Penata Tingkat I NIP. 19860922 201001 1 005	ANGGOTA	
8	JULEONDI WANDANA PUTRA, SH	Kasubbag Kepegawaian dan Umum Penata Tingkat I NIP. 19850725 201102 1 001	ANGGOTA	

NØ	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
9	ELIWON FERIYANUS, S. Pd, M. Si	Ketua Tim Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah / Arsinaris Ahli Muda Penata NIP. 19870921 201102 1 002	ANGGOTA	
10	MAULUDDIN, AB, SP	Ketua Tim Pengembangan Pemuda Bidang Layanan Kepemudaan / Analisis Kebijakan Ahli Muda Penata Tingkat I NIP. 19780220 199703 1 001	ANGGOTA	
11	SAID MASFRIADY IRMAWAN, SE, M. Si	Ketua Tim Pemberdayaan Pemuda Bidang Layanan Kepemudaan / Analisis Kebijakan Ahli Muda Penata Tingkat I NIP. 19830413 201102 1 003	ANGGOTA	
12	RAJA DAYANG SURI,SE,M.SI	Ketua Tim Kemitraan dan Penghargaan Pemuda / Analisis Kebijakan Ahli Muda Pembina NIP. 19780731 200312 2 002	ANGGOTA	
13	ERDHI MAULANA, S. STP, M. Si	Ketua Tim Sarana Prasarana dan Kemitraan / Analisis Kebijakan Ahli Muda Penata Tingkat I NIP. 19870819 200602 1 001	ANGGOTA	
14	TENGGU SYARIF FADILLAH, S. Sos	Ketua Tim Sarana dan Prasarana Pemuda / Analisis Kebijakan Ahli Muda Penata Tingkat I NIP. 19671109 199203 1 005	ANGGOTA	
15	BENNY SAPUTRA, SE, MM	Ketua Tim Pengembangan dan Kemitraan Sarana Prasarana / Analisis Kebijakan Ahli Muda Penata NIP. 19771121 200312 1 003	ANGGOTA	
16	HANS RAMOND, S. Pd	Ketua Tim Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga / Analisis Kebijakan Ahli Muda Penata Tingkat I NIP. 19821227 201102 1 002	ANGGOTA	
17	ASTUTI WIRANINGSIH, S. STP, M. Si	Ketua Tim Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus / Analisis Kebijakan Ahli Muda Pembina NIP. 19820829 200012 2 001	ANGGOTA	

NØ	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
18	ADE PRIBADI, S. IP, M. IP	Ketua Tim Pengembangan Organisasi, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga / Analisis Kebijakan Ahli Muda Penata Tingkat I NIP. 19841216 201001 1 006	ANGGOTA	
19	RAHADIAN SAMI, S. Pd, AIFO	Ketua Tim Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pelajar dan Tenaga Keolahraagaan / Analisis Kebijakan Ahli Penata NIP. 19900825 201503 1 003	ANGGOTA	
20	DHITA MAYASARI, SE, MM	Ketua Tim Promosi dan Pembinaan Olahraga Mahasiswa / Analisis Kebijakan Ahli Muda Penata NIP. 19820519 200212 2 001	ANGGOTA	
21	TENGGU FERDHY KHALIL, S. STP, M. Si	Ketua Tim Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga / Analisis Kebijakan Ahli Muda Penata NIP. 19911125 200406 1 001	ANGGOTA	

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI RIAU**



H. ERISMAN YAHYA, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19761130 200112 1 003

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
 Nomor : Kpts. 379 / Dispora / VI / 2025
 Tanggal : 5 Juni 2025

**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA
 PROVINSI RIAU NOMOR KPTS. 379/DISPORA/V/2025 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 (RENSTRA) DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA PROVINSI RIAU
 TAHUN 2025-2029**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	DIPA RESKITAMA, ST, M. Si	Ketua Tim Perencana Program / Perencana Ahli Muda Penata Tingkat I NIP. 19860922 201001 1 005	KOORDINATOR	
2	PUTRI INDRAYANTY, S. STP, M. Si	Staf Sub Bagian Perencanaan Program / Penelaah Teknis Kebijakan Pembina NIP. 19850421 200412 2 001	SEKRETARIS	
3	JULEONDI WANDANA PUTRA, SH	Kasubbag Kepegawaian dan Umum Penata Tingkat I NIP. 19850725 201102 1 001	ANGGOTA	
4	LEO NARDO TOHONAN, S. Kom	Staf Sub Bagian Perencanaan Program / Pranata Komputer Ahli Pertama Penata Muda Tingkat I NIP. 19850813 201102 1 004	ANGGOTA	
5	RUSDJANTO, S. Sos	Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Umum / Arsiparis Ahli Pertama Penata Muda Tingkat I NIP. 19791128 201001 1 013	ANGGOTA	
6	KEZIA DWI ANA SUPRIATIN, S. Tr. IP	Staf Sub Bagian Perencanaan Program / Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Penata Muda NIP. 20000523 202208 2 001	ANGGOTA	
7	NAWANG WULAN, HC, ST	Staf Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga / Penelaah Teknis Kebijakan Penata Tingkat I NIP. 19791030 200112 2 001	ANGGOTA	
8	AFRIDA, M. Pd	Staf Bidang Layanan Kepemudaan / Penelaah Teknis Kebijakan Pembina Tingkat I NIP. 19810425 200501 2 013	ANGGOTA	
9	RONALD IMRON, S. Sos	Staf Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan / Penelaah Teknis Kebijakan Penata NIP. 19811208 201001 1 014	ANGGOTA	
10	TRITI FEPRIANTI, S. Pd	Staf Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga / Penelaah Teknis Kebijakan Penata Muda Tingkat I NIP. 19840213 201001 2 013	ANGGOTA	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
11	ISMARULLAH, ST	Staf Sub Bagian Perencanaan Program	ANGGOTA	
12	YULHASMI	Staf Sub Bagian Perencanaan Program	ANGGOTA	
13	OKTI DIARISA, A. Md	Staf Sub Bagian Perencanaan Program	ANGGOTA	
14	QORY MALINDO, S. Kom	Staf Sub Bagian Perencanaan Program	ANGGOTA	
15	ROBBY ZUKRI PUTRA, S. Kom	Staf Sub Bagian Perencanaan Program	ANGGOTA	
16	INZA MAYASARI, SE	Staf Sub Bagian Perencanaan Program	ANGGOTA	
17	ROMI RUSDI, S. Kom	Staf Bidang Layanan Kepemudaan	ANGGOTA	
18	SALTINI	Staf Bidang Layanan Kepemudaan	ANGGOTA	
19	TELLY YUNIA FITRI, SE	Staf Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan	ANGGOTA	
20	LIFCAR HIDAYAT	Staf Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan	ANGGOTA	
21	MATLA FAJRI, S. Sos	Staf Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	ANGGOTA	
22	APRILIANI SAPUTRI, S. Kom	Staf Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	ANGGOTA	
23	EKKI SUPARWAN	Staf Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga	ANGGOTA	
24	FEBRI YONLI	Staf Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga	ANGGOTA	

**KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA
PROVINSI RIAU**



H. ERISMAN YAHYA, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19761130 200112 1 003

Form Penjabaran
(dihasilkan lampiran dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2025 – 2029)

PENYELARASAN RENSTRA PD TERHADAP RPJMN TAHUN 2025 – 2029

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau melalui Mitra Bidang dan Perangkat Daerah melakukan Penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan Kondisi, Karakteristik dan Otonomi Daerah, antara lain:

1. PERIODESASI

No	Periodesasi RPJMN	Periodesasi Renstra PD
(1)	(2)	(3)
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029	Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau tahun 2025 – 2029

2. SUBKEGIATAN YANG Mendukung KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) YANG TERDAPAT DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029;

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	01 - Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	-	-	-	-
2	01 - Investasi pelayanan kesehatan primer	-	-	-	-
3	02 - Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	-	-	-	-
4	04 - Konservasi Sumber Daya Air	-	-	-	-
5	05 - Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	-	-	-	-
6	06 - Pengembangan Hilirisasi Kelapa	-	-	-	-
7	06 - Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	-	-	-	-

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	09 - Pengembangan Pangan Akuatik (<i>Blue Food</i>)	-			-
9	10 - Pengembangan Pangan Hewani	-	-	-	-
10	11 - Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	-	-	-	-

3. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TELAH DITENTUKAN LOKASINYA DI DALAM RPJMN TAHUN 2025 – 2029; (Perpres RPJMN lampiran I tabel 2.2)

NO	Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025 - 2029	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Makan Bergizi Gratis				
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas				
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul				
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota				
5	Program Penuntasan TB				
6	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat				
7	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional				
8	Peningkatan Produksi Daging Nasional Sapi dan Susu Sapi				
9	<i>Biorefinery</i> Sumatra				
10	Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan				
11	Program hilirisasi sagu, singkong, ubi jalar Proyek : I Penguatan penyediaan bahan baku hilirisasi tepung sagu dan singkong II Pengembangan Industri Sagu				
12	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut				
13	Program Pengembangan Industri Dirgantara; Pengembangan N2 19 Amfibi				
14	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu				
15	Penyediaan Peta Dasar Skala Nasional Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia				
16	Kawasan Industri Futong				
17	Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas				
18	Pembangunan 3 Juta Rumah				

Ket : hanya diisi oleh OPD yang berkaitan dengan ProSN

4. KINERJA TUJUAN, SASARAN DAN OUTCOME SERTA INDIKATOR RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 UNTUK MENDUKUNG RPJMN TAHUN 2025-2029;

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 – 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan (3)	Sasaran (4)	Outcome Program (5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-	-	-	-
2.	PDRB per kapita (Rp. Juta)				
3.	Kontribusi PDRB Provinsi (%)				
4	Tingkat Kemiskinan	-	-	-	-
5	Rasio Gini				
6	Indeks Modal Manusia	Jumlah Atlet yang Berprestasi Ditingkat Wilayah dan Nasional (Orang)	Jumlah Atlet yang kompetitif di even tingkat wilayah dan nasional (Orang)	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	-	-	-	-
8	IKLH Daerah				
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	-	-	-

**5. INDIKATOR KINERJA SASARAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029 DENGAN INDIKATOR
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU (LAMPIRAN III RPJMN)**

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029					2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas			Kementerian Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)			55,17	55,58	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/ Internasional	76-80	76-80	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Jumlah Atlet yang Berprestasi Ditingkat Wilayah dan Nasional (Orang)			63	78	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Peringkat pada Youth Olympic Games	81-83 (2026)		Kementerian Pemuda dan Olahraga		Jumlah pemuda yang berperan aktif di masyarakat (Orang)		460	350	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Peringkat pada Asian Youth Games	13-15	12-14	Kementerian Pemuda dan Olahraga		Jumlah organisasi pemuda yang aktif dalam pembangunan (Organisasi)		10	10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Peringkat pada Asian Youth Para Games	3-5	2-4	Kementerian Pemuda dan Olahraga		Jumlah Atlet yang kompetitif di even tingkat wilayah dan		243	407	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi	66,74	74,28	Kementerian Pemuda dan Olahraga		nasional (Orang)	Persentase Pemuda yang Berdaya Saing (%)	0,027	0,018	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Angka kesakitan pemuda	5,99	5,76	Kementerian Pemuda dan Olahraga			Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	3,28	2,5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase remaja perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil	11,63	9,63	Kementerian Pemuda dan Olahraga			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	3,45	3,45	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase usia muda (16-30 Tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti	24,13	23,00	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	75,79	82,85	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Jumlah perolehan medali pada SEA Games	87 emas/ 80 Perak/	87 emas/ 80 perak/	Kementerian Pemuda dan Olahraga						

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		109 perunggu	109 perunggu							
	Jumlah perolehan medali pada ASEAN Para Games	7 emas / 11 perak / 18 perunggu (2029)		Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Jumlah perolehan medali pada Asian Games	29 emas / 30 perak / 36 perunggu (2026)		Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Jumlah perolehan medali pada Asian Para Games	7 emas / 11 perak / 18 perunggu (2026)		Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	36,71	47,50	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas			Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Provinsi dengan sekolah khusus olahraga yang terstandardisasi	18	22	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Kab/kota dengan PPLP yang terbentuk	29	49	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade	15	15	Kementerian Pemuda dan Olahraga						

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN (4)	SASARAN (5)	OUTCOME PROGRAM (6)	2025 (7)	2029 (8)	
(1)	(3) dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat									
		15	30	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Jumlah perolehan medali pada Youth Olympic Games	1 emas (2026)		Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Games	1 - 2	2 - 3	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Para Games	12 - 15	14 - 16	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	25,49	46,49	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Proporsi pemuda dengan keterampilan TIK	96,96	98,85	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Persentase pemuda yang merokok	23,88	23,05	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Persentase pemuda berolahraga	38,92	47,50	Kementerian Pemuda dan Olahraga						

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Persentase pemuda pekeja tidak penuh	31	28,68	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Rasio Kewirausahaan Pemuda	1,33	1,61	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekeja	17,82	19,81	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki	66,3	67,84	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	5,65	6,72	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	1,48	1,8	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabor unggulan olimpiade	180	300	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan paralimpiade	100	100	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan olimpiade	500	1500	Kementerian Pemuda dan Olahraga						


NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator / Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan paralimpiade	120	200	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Jumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikasi internasional	250	500	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Jumlah pelatih cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasional	50	100	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpiade dan Paralimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaan	18	18	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Jumlah lembaga yang difasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/ atau direnovasi	11	11	Kementerian Pemuda dan Olahraga						

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator / Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Jumlah lembaga yang difasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade	548	548	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti / terselenggara	20	20	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti / terselenggara	20	20	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Persentase penduduk usia sekolah (7-18 tahun) yang melakukan olahraga seminggu terakhir	59,06	85,36	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga seminggu terakhir	11,67	15,10	Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga	100	100	Kementerian Pemuda dan Olahraga						

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Persentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga dalam setahun	3,59	4,75	Kementerian Pemuda dan Olahraga						

Catatan : Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Kementerian/Lembaga masing-masing (dapat diambil pada Lampiran III RPJMN 2025-2029)

6. DUKUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029 TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2025 – 2029 (berdasarkan SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 tahun 2025)

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Penanggulangan Kemiskinan dengan Proyek/Kegiatan:				
	1) Optimalisasi pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	-	-		-
	2) Sekolah Rakyat	-	-		-
B	Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan pengadaan pengadaan dan Pengeloaaan Gabah/ Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah				
C	Kesehatan Untuk Semua dengan Proyek/Kegiatan				
	1) Jaminan Kesehatan Nasional				1.
D	Perluasan Akses Pendidikan dengan Proyek/Kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah				1.
E	Pertumbuhan Ekonomi dengan Proyek Kegiatan				
	1) Pengendalian Inflasi				1.

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan				1.
	3) Kemudahan perizinan di daerah				1.
F	Program Strategis Nasional dengan Proyek/Kegiatan lainnya yang di tetapkan oleh Presiden				1.

Catatan : Diisi oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi mendukung Program Strategis Nasional (PSN)

Metadata

1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Institusi Penghasil: Kemenpora dan Bappenas

Defenisi

Indeks Pembangunan Pemuda adalah ukuran komposit yang menggambarkan capaian pembangunan pemuda melalui beberapa domain, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi yang dihitung dalam periode satu tahun.

Interpretasi

Menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan pemuda di daerah dalam periode satu tahun. Semakin tinggi nilai Indeks Pembangunan Pemuda maka semakin baik kualitas pemuda dalam pembangunan daerah.

Metode/Rumus Perhitungan

$IPP = (\text{Indeks Pendidikan} + \text{Indeks Kesehatan} + \text{Indeks Kesempatan Kerja} + \text{Indeks Partisipasi dan Kepemimpinan} + \text{Indeks Gender dan Diskriminasi}) / 5$

Ukuran/Satuan	: Nilai (Indeks)
Judul Publikasi/Sumber Data	: Kemenpora dan Bappenas
Tahun Data Tersedia	: 2020-2023
Level Estimasi	: Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota
Frekuensi Pengumpulan	: Tahunan.
Apakah Indikator dapat diakses umum	: Ya.

2. Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Wilayah dan Nasional

Institusi Penghasil: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

Defenisi

Jumlah atlet yang memperoleh medali pada kejuaraan single event dan multi event tingkat wilayah dan nasional dalam satu tahun.

Interpretasi

Menunjukkan keberhasilan pembinaan olahraga prestasi daerah.

Metode/Rumus Perhitungan

Jumlah Atlet Berprestasi = Atlet peraih medali single event + multi event

Ukuran/Satuan	: Orang
Judul Publikasi/Sumber Data	: Dispora, KONI, Pengcab
Tahun Data Tersedia	: 2021-2024
Level Estimasi	: Nasional/Provinsi
Frekuensi Pengumpulan	: Tahunan.
Apakah Indikator dapat diakses umum	: Ya.

3. Jumlah Atlet Kompetitif Tingkat Wilayah dan Nasional

Institusi Penghasil: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

Defenisi

Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan olahraga tingkat wilayah dan nasional dalam satu tahun.

Interpretasi

Menggambarkan peningkatan pembinaan dan daya saing atlet daerah.

Metode/Rumus Perhitungan

Jumlah Atlet Kompetitif = Atlet single event + multi event

Ukuran/Satuan	: Orang
Judul Publikasi/Sumber Data	: Dispora, KONI, Pengcab
Tahun Data Tersedia	: 2021-2024
Level Estimasi	: Nasional/Provinsi
Frekuensi Pengumpulan	: Tahunan.
Apakah Indikator dapat diakses umum	: Ya.

4. Jumlah Pemuda Berperan Aktif di Masyarakat

Institusi Penghasil: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

Defenisi

Jumlah pemuda yang terlibat aktif dalam kegiatan kepemudaan, sosial, kewirausahaan dan organisasi dalam satu tahun.

Interpretasi

Menunjukkan tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah.

Metode/Rumus Perhitungan

Jumlah pemuda aktif kegiatan kepemudaan selama 1 tahun

Ukuran/Satuan	: Orang
Judul Publikasi/Sumber Data	: Dispora Prov Riau dan Dispora Kab/Kota
Tahun Data Tersedia	: 2020-2024
Level Estimasi	: Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota
Frekuensi Pengumpulan	: Tahunan.
Apakah Indikator dapat diakses umum	: Ya.

5. Jumlah Organisasi Pemuda Aktif

Institusi Penghasil: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

Defenisi

Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif melaksanakan kegiatan dan terdaftar dalam satu tahun.

Interpretasi

Menggambarkan partisipasi kelembagaan pemuda dalam pembangunan.

Metode/Rumus Perhitungan

Jumlah organisasi pemuda aktif dalam 1 tahun

Ukuran/Satuan	: Organisasi
Judul Publikasi/Sumber Data	: Dispora Prov Riau

Tahun Data Tersedia : 2020-2024
Level Estimasi : Nasional/Provinsi
Frekuensi Pengumpulan : Tahunan.
Apakah Indikator dapat diakses umum : Ya.

6. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Institusi Penghasil: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

Defenisi

Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah yang diberikan oleh Inspektorat setiap tahun.

Interpretasi

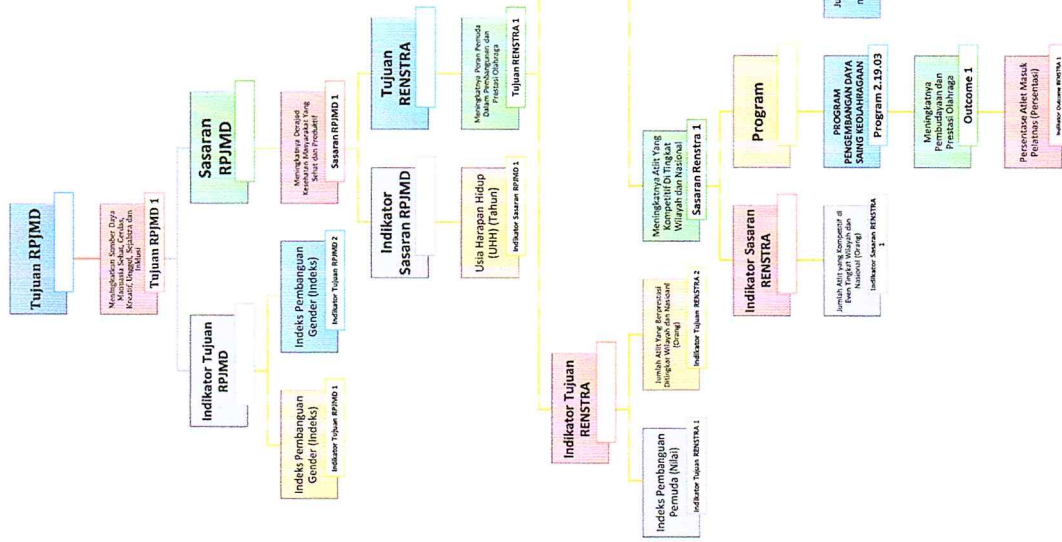
Menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Metode/Rumus Perhitungan

Nilai evaluasi SAKIP tahunan

Ukuran/Satuan : Nilai
Judul Publikasi/Sumber Data : Inspektorat Provinsi
Tahun Data Tersedia : 2020-2024
Level Estimasi : Provinsi
Frekuensi Pengumpulan : Tahunan.
Apakah Indikator dapat diakses umum : Ya.

CASCADING RENSTRA DISPORA 2025 - 2029



KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA
PROVINSI BAU



H. YURNALIS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710417 200212 1 006

**MATRIK VERIFIKASI
RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029**

Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Riau

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1.	COVER	JUDUL COVER : "RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2029 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA PROVINSI RIAU	-	V	-	-
2.	PERGUB PENETAPAN	Keputusan Gubernur Riau Nomor : 35 Tahun 2025 tanggal 28 Oktober 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	-	V	-	-
3.	DAFTAR ISI	Sesuai dengan sistematika Renstra Perangkat Daaerah	-	V	-	-
4.	DAFTAR TABEL	Judul Tabel dan Halaman Tabel	-	V	-	-
5	DAFTAR GAMBAR	Judul Gambar dan Halaman Gambar	-	V	-	-
6.	BAB I PENDAHULUAN		-	V	-	-
	1.1. Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 - 2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025 - 2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.	-	V	-	-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		Tambahan : Narasi Terkait Inmendagri No 2 Tahun 2025				
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025 - 2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.	V	-	-	
	1.3 Maksud dan Tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.	V	-	-	
	1.4 Sistematisa Penulisan	Menjelaskan sistematisa penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.	V	-	-	
7.	BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	Sub bab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat sekurang-kurangnya hal - hal sebagai berikut:: a. Tugas, fungsi dan struktur PD; b. Sumber daya PD; c. (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah). Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti: a. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (Apabila ada); b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (Apabila ada); dan c. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (Apabila ada). Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:	-	-	-	

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan Isu strategis.				
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).	-	-	-	
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.	-	-	-	
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan 	V	-	-	

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		dengan capaian IKU dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). 3. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data) Dapat menggunakan Tabel T-C.23 dan T-C.24 Peremendagri No. 86 Tahun 2017.	-	-	-	
	2.4 Kelompok Sasaran Layanan	Kelompok Sasaran Layanan (dapat ditambahkan beberapa sub bab lainnya sesuai dengan kondisi daerah)	-	-	-	
	2.5. Mitra Perangkat Daerah	Jika ada	-	-	-	
	2.6. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	1. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.	-	-	-	

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		<p>2. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.</p>				
2.7	Isu Strategis	<p>1. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD.</p> <p>2. Merumuskan isu strategis daerah dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> permasalahan: isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan 	V	-	-	

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		Untuk rumusan permasalahan dapat menggunakan Tabel T-B.35 Permendagri No. 86 Tahun 2017.			-	
		Untuk rumusan isu strategis dapat menggunakan Tabel 2.1. Imendagri No. 2 Tahun 2025	-	-	-	
8.	BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada: <ul style="list-style-type: none"> a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 - Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan. - Jika PD mampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarnya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu. - Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan : <ul style="list-style-type: none"> a. kalimat kondisi; b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan 	-	-	-	

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		<p>d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. - Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. - Penyajian lokus Renstra PD untuk provinsi dapat disajikan berdasarkan kabupaten/kota dan/ atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah. - Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. 				

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Tahun 2025 – 2029; Menggunakan Tabel 3.3. Immendagri No. 2 Tahun 2025.	V	-	-	
3.2.	Strategi Renstra Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 (memperhatikan Tabel. Tabel T-B.35 Permendagri No. 86 Tahun 2017 Bab II Permasalahan Perangkat Daerah)	V	-	-	
3.3.	Penahapan	Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah	V	-	-	
		Menggunakan Tabel 3.4. Immendagri No. 2 Tahun 2025.	V	-	-	
3.4.	Lokus (bila ada)	Lokus Rensta Perangkat Daerah (Jika ada) dimana penyajian lokus Renstra Perangkat Daerah untuk Provinsi berdasarkan kabupaten/kota dan atau berdasarkan wilayah pengembangan serta disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan daerah	-	-	-	
3.5.	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025–2029 atau untuk menyelesaikan Masalah PD	V	-	-	
		Menggunakan Tabel 3.5. Immendagri No. 2 Tahun 2025			-	

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
9	BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGAR AAN BIDANG URUSAN	<p>Bab IV paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uraian Program; - Uraian Kegiatan - Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; - Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; - Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan - Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 	V	-	-	
	4.1 Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. - Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. 	V	-	-	

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		- Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.	V	-	-	
		- Menggunakan Tabel 4.2. Inmendagri No. 2 Tahun 2025	V	-	-	
		- Menggunakan Tabel 4.3. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 (Dapat diunduh melalui SIPD)	V	-	-	
		- Menggunakan Tabel 4.4. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 (Dapat diunduh melalui SIPD)	V	-	-	
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. 2. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). 3. IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. 	V	-	-	
		1. Menggunakan Tabel 4.5. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 (Dapat diunduh melalui SIPD)	V	-	-	
		2. Menggunakan Tabel 4.6. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 (Dapat diunduh melalui SIPD)	V	-	-	

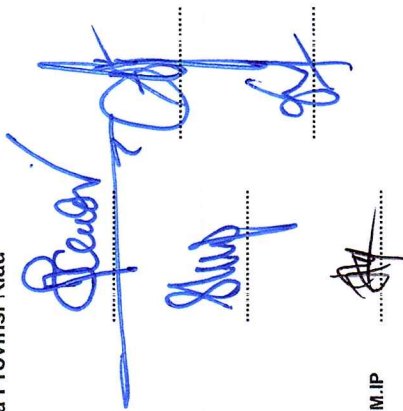
NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESIAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
10	BAB V PENUTUP	Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah	-	V	-	
	LAMPIRAN	<ul style="list-style-type: none"> .. SK Tim Penyusunan Renstra .. Matrik Penyelarasan RPJMN – Renstra PD .. Metadata Indikator .. Dan lain - lain yang dianggap perlu 	-	V	-	

Pekanbaru, 28 Oktober 2025

Verifikator :

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Riau

1. Nur Hamdi, ST
2. Dipa Reskitama, S.T., M.Si
3. Putri Indriyanty, S.STP., M.Si
4. Leo Nardo Tohonan, S.Kom
5. Kerzia Dwi Ana Supriatin, S.Tr.IP., M.IP



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau

1. Raja Juarisman, S.T., M.Si
2. Neil Yulia, S.E., M.Si
3. Muhammad Ikhsan, S.IP
4. Dini Gustiza, S.E
5. Muhammad Muhajir, S.E
6. Mayhayati, ST

